

KAJIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

100 %

70 %

40 %

Analisa Pengaruh Rendahnya
Indeks Pendidikan
Di Kabupaten Tangerang

Endang Iryani
Akhmad Subkhi Ramdani

100 %

70 %

KAJIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

40 %

Analisa Pengaruh Rendahnya Indeks Pendidikan
Di Kabupaten Tangerang

Endang Iryani
Akhmad Subkhi Ramdani

Z
Design

ISBN 978-602-52974-3-4



9 786025 297434

Kajian Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Analisa Pengaruh Rendahnya Indeks Pendidikan di Kabupaten Tangerang

PENULIS

Endang Iryani, M.Pd
Akhmad Subkhi Ramdani, M.Pd

EDITOR

Drs. Hidayat

PENYUNTING

Noerlina Anggraeni, M.Pd

LAYOUTER

Zamzamani Lafaf, S.Kom

Penerbit:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas MH Thamrin
Kampus A Lantai 2 Universitas MH Thamrin
Jalan Raya Pondok Gede nomor 23-25 Kramat Jati-Jakarta Timur 13550 Tlp. 021. 8096411,
Fax 021. 8092235

Kajian Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Analisa Pengaruh Rendahnya Indeks Pendidikan di Kabupaten Tangerang

PENULIS

Endang Iryani, M.Pd

Akhmad Subkhi Ramdani, M.Pd

EDITOR

Drs. Hidayat

PENYUNTING

Noerlina Anggraeni, M.Pd

LAYOUTER

Zamzamani Lafaf, S.Kom

Edisi Pertama 2019

Cetakan pertama 2019

Penerbit : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Universitas MH Thamrin

Kampus A Lantai 2 Universitas MH Thamrin

Jalan Raya Pondok Gede nomor 23-25 Kramat Jati-Jakarta Timur

13550 Tlp. 021. 8096411, Fax 021. 8092235

ISBN 978-602-52974-3-4

ISBN 978-602-52974-3-4



KATA PENGANTAR

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen dasar dalam membangun kemajuan suatu bangsa, yang berarti bahwa kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas yang dimiliki oleh SDM bangsa tersebut. Sehingga pembangunan kualitas SDM sangat penting dalam membangun kemajuan bangsa, diatas pentingnya pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur dalam membangun kesejahteraan bangsa.

Salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan SDM adalah tingkat pendidikan yang didapat oleh SDM tersebut (Rata-rata Lulusan Sekolah/RLS). Karena pendidikan merupakan kunci yang mampu meningkatkan kualitas SDM dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu menjunjung pendidikan bagi warganya, sehingga tidak heran kalau pendidikan juga menjadi indikator dari keberhasilan pemerintahan.

Kabupaten Tangerang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang wilayahnya sangat strategis, yakni dekat dengan ibu kota yang terhubung dengan jalan tol. Selain itu, Kabupaten Tangerang terkenal dengan wilayah seribu industri, dimana industri-industri besar terdapat di kabupaten Tangerang ini, seperti Perusahaan Elektronik LG, Perusahaan ban Gajah Tunggal, Perusahaan sepatu Nike dan lain sebagainya. Disamping itu juga, properti besar bermukim disini, seperti Citra Raya, Lippo dan Sumarecon hal ini menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pajak yang tinggi bagi kabupaten Tangerang. Selain itu juga, wilayah yang terkenal dengan warni ungu ini memiliki bandara Internasional yakni Bandara Soekarno Hatta. Akan tetapi kelebihan-kelebihan ini berbanding terbalik dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada sektor pendidikan.

Pada tahun 2017 Indeks Pendidikan Manusia pada sektor pendidikan masih sangat rendah, tamatan Sekolah Dasar (SD) mencapai 24, 45%, tamatan SLTP 22, 66%¹. Artinya bahwa bonus demografi dan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak sebanding dengan pembangunan SDM pada sektor pendidikan. Seharusnya dengan banyaknya industri kecil sampai besar berdiri di Kabupaten Tangerang mampu memancing SDM kabupaten Tangerang memiliki angka tinggi pada pendidikan diatas SLTA, sedangkan ini hanya 4,99% artinya bahwa banyak pekerja yang berasal dari masyarakat kabupaten Tangerang adalah pekerjakasar pada industri-industri yang terdapat di Kabupaten Tangerang. Artinya, masyarakat kabupaten Tangerang menjadi tamu didaerahnya sendiri.

Landasan inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor penyebab dari rendahnya pembangunan SDM pada bidang pendidikan. Sehingga faktor penyebab dapat dikenali dan dibuatkan solusi oleh peneliti dan menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan SDM pada tahun berikutnya

Jakarta, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan yang akan diteliti	2
1.3 Tujuan penelitian.....	2
1.4 Urgensi Penelitian	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Indeks Pembangunan Manusia	3
2.2 Indeks Pendidikan.....	5
BAB III KARAKTERISTIK OBJEK PENELITIAN	
3.1 Geografis	8
3.2 Iklim dan curah hujan	9
3.3 Penduduk dan mata pencaharian	9
3.4 Wilayah administrasi	10
3.5 Kondisi demografi.....	12
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1 Metodologi	16
4.2 Fokus Penelitian	16
4.3 Sumber Data dan Responden.....	16
4.4 Teknik Pengumpulan Data	17
4.5 Metode Analisis.....	18
BAB V HASIL PENELITIAN	
5.1 Pembahasan Data Hasil Wawancara.....	19
5.1.1 Pembahasan Hasil Wawancara Dengan Orang Tua/Wali Murid.....	19
5.1.2 Pembahasan Hasil Wawancara dengan Guru, Kepala Sekolah, Tokoh Masyarakat dan Pelaku Pendidikan Lainnya	26
5.1.3 Cara pelaksanaan ujian sekolah	31
5.1.4 Program wajib belajar 9 tahun	32
5.1.5 Pemerataan Pendidikan	35
5.1.6 Pendidikan untuk keluarga miskin/prasejahtera	37
5.1.7 Pendidikan di pelosok desa	39
5.1.8 Pemasalahan anak putus sekolah	40
5.1.9 Pelaksanaan Program Paket A,B dan C.....	42
5.1.10 Program Dana BOS	45

5.1.11 Kendala dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tangerang	47
5.1.12 Permasalahan Prioritas yang perlu dipecahkan.....	48
5.1.13 Kebijakan dan program prioritas untuk peningkatan pendidikan	49
5.2 Analisis pemecahan permasalahan (problem solving).....	52
5.3 Analisis faktor internal dan eksternal	58
5.4 Strategi dan program kerja peningkatan indeks pendidikan	62

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 KESIMPULAN	66
6.2 REKOMENDASI.....	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen dasar dalam membangun kemajuan suatu bangsa, yang berarti bahwa kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas yang dimiliki oleh SDM bangsa tersebut. Sehingga pembangunan kualitas SDM sangat penting dalam membangun kemajuan bangsa, diatas pentingnya pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur dalam membangun kesejahteraan bangsa.

Salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan SDM adalah tingkat pendidikan yang didapat oleh SDM tersebut (Rata-rata Lulusan Sekolah/RLS). Karena pendidikan merupakan kunci yang mampu meningkatkan kualitas SDM dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu menjunjung pendidikan bagi warganya, sehingga tidak heran kalau pendidikan juga menjadi indikator dari keberhasilan pemerintahan.

Kabupaten Tangerang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang wilayahnya sangat strategis, yakni dekat dengan ibu kota yang terhubung dengan jalan tol. Selain itu, Kabupaten Tangerang terkenal dengan wilayah seribu industri, dimana industri-industri besar terdapat di kabupaten Tangerang ini, seperti Perusahaan Elektronik LG, Perusahaan ban Gajah Tunggal, Perusahaan sepatu Nike dan lain sebagainya. Disamping itu juga, properti besar bermukim disini, seperti Citra Raya, Lippo dan Sumarecon hal ini menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pajak yang tinggi bagi kabupaten Tangerang. Selain itu juga, wilayah yang terkenal dengan warni ungu ini memiliki bandara Internasional yakni Bandara Soekarno Hatta. Akan tetapi kelebihan-kelebihan ini berbanding terbalik dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada sektor pendidikan.

Pada tahun 2017 Indeks Pendidikan Manusia pada sektor pendidikan masih sangat rendah, tamatan Sekolah Dasar (SD) mencapai 24, 45%, tamatan SLTP 22, 66%¹. Artinya bahwa bonus demografi dan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak sebanding dengan pembangunan SDM pada sektor pendidikan. Seharusnya dengan banyaknya industri kecil sampai besar berdiri di Kabupaten Tangerang mampu memancing SDM kabupaten Tangerang memiliki angka tinggi pada pendidikan diatas SLTA, sedangkan ini hanya 4,99% artinya bahwa banyak pekerja yang berasal dari masyarakat kabupaten Tangerang adalah pekerja kasar pada industri-industri yang terdapat di Kabupaten Tangerang. Artinya, masyarakat kabupaten Tangerang menjadi tamu didaerahnya sendiri.

Landasan inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor penyebab dari rendahnya pembangunan SDM pada bidang pendidikan. Sehingga faktor penyebab dapat dikenali dan dibuatkan solusi oleh peneliti dan menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan SDM pada tahun berikutnya.

1.2 Permasalahan yang akan diteliti

Lingkup dari penelitian ini adalah rendahnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sektor Pendidikan. Sehingga pada penelitian ini akan mengungkap faktor-faktor penyebab rendahnya pembangunan SDM pada sektor pendidikan di Kabupaten Tangerang

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari rendahnya indeks pembangunan manusia pada sektor pendidikan di kabupaten Tangerang.

1.4 Urgensi Penelitian

Urgensi Penelitian dari topik penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya pembangunan SDM di kabupaten Tangerang pada sektor pendidikan sehingga hasil dari penelitian ini akan menjadi rekomendasi dan solusi bagi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan SDM pada sektor pendidikan.

¹ Buku profile kab. Tangerang tahun 2017

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Permasalahan yang sangat sulit adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kualitas dan kapabilitas, dan ini artinya adalah pembangunan manusia. Salah satu cara dalam menyelesaikan masalah pembangunan manusia adalah dengan melakukan *human capital* atau investasi manusia. Ada tiga jenis cara dalam *Human Capital* yaitu (1) pendidikan dan latihan, (2) migrasi, dan (3) perbaikan gizi dan kesehatan². Pendidikan merupakan modal dasar dalam pembangunan manusia, menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bahwa salah satu untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia adalah pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas. IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. IPM pendidikan dihitung berdasarkan angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah sebagai ukuran capaian pembangunan di bidang pendidikan.

Berdasarkan Human Development Indeks (HDI) indicator yang digunakan untuk mengukur ukuran HDI adalah mencakup dua parameter yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS)³. Populasi yang digunakan adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya. Perlunya batasan tersebut agar angkanya dapat mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berumur dibawah 15 tahun masih dalam proses sekolah akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata rata lama sekolahnya. Kedua parameter tersebut disertakan agar mampu menggambarkan tingkat pengetahuan (gambaran angka LIT), Dimana LIT merupakan rasio penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok

² Simanjuntak, Payaman. J. 2008. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga Penelitian FE UI. Jakarta. Hal.25

³ Maulana dan Bowo 2013

penduduk secara keseluruhan. Sedangkan gambaran angka MYS merupakan cerminan terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.⁴ Beberapa penelitian pun telah banyak membahas mengenai IPM, ini menandakan bahwa permasalahan IPM sangatlah penting dan dianggap isu yang sangat mendasar. Berikut beberapa penelitian mengenai IPM:

Charisma Kuriata Ginting S, dkk (2008) melakukan penelitian yang berjudul “Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”⁵. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda dengan metode GLS (General Least Square). Dengan menggunakan beberapa variabel yaitu Indeks Pembangunan Manusia, pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, rasio penduduk miskin, dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Dari penelitian dihasilkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh negatif, pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bukan makanan berpengaruh positif, rasio penduduk miskin berpengaruh negatif, dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia.

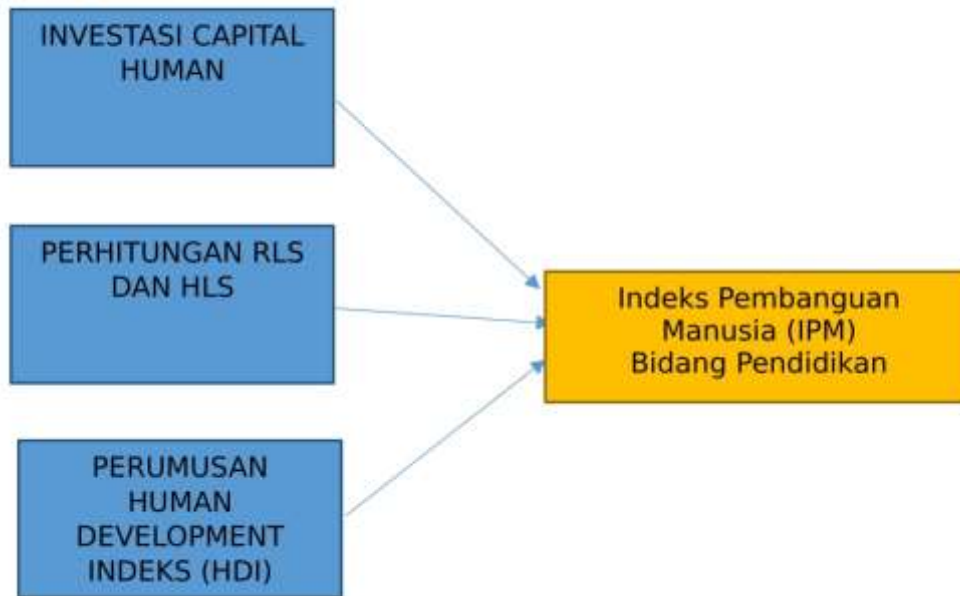
Astri Winarti (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012”⁶ menggunakan empat variabel yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, tingkat kemiskinan dan PDB. Penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Dihasilkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, Variabel PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Indonesia.

Berdasarkan landasan teori dan review penelitian diatas maka tinjauan pustaka pada penelitian ini dapat di gambarkan dalam diagram sebagai berikut:

⁴ UNDP, Human Development Report, 2008

⁵Charisma Kuriata Ginting S, dkk (2008) melakukan penelitian yang berjudul “Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Economics Development Analysis Journal. Vol 1 November 2012

⁶ Astri Winarti, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012. Skripsi; Repasitory Perpustakaan Universitas Diponegoro



2.1. Indeks Pendidikan

Sebagai salah satu indikator yang dihitung dalam mengukur indeks pembangunan manusia (IPM) adalah indicator pendidikan. Indeks Pendidikan menunjukkan pada tingkat pengetahuan dan keterampilan suatu daerah. Indeks pendidikan menurut UNDP (United Nation Development Program) versi lama (sebelum tahun 2019) diukur dengan dua data yaitu angka melek hurup (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS).

Angka melek hurup (AMH) adalah prosentase penduduk usia 10 tahun yang dapat membaca dan menulis hurup latin, dimana anak usia 10 tahun keatas dipandang telah cukup untuk belajar membaca dan menulis di sekolah,

Adapun Rata-Rata lama sekolah (RLS) merupakan jumlah lamanya penduduk 10 tahun ke atas bersekolah dibagi dengan jumlah penduduk usi 10 tahun ke atas. Proses penghitungannya, kedua indicator digabung setelah masing-masing diberi bobot.

RLS dihitung dengan dua variable, yaitu tingkat kelas yang sedang atau pernah diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Perhitungan RLS dilakukan dengan bertahap, tahap pertama dihitung lama sekolah untuk masing-masing individu dengan menggunakan pola hubungan antar variable, dan tahap kedua menghitung indeks rata-rata lama sekolah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks RLS} = \frac{\text{RLSTahun} - \text{RLS Min}}{\text{Sasaran Ideal} - \text{RLS Min}}$$

Untuk menentukan indeks pendidikan dilakukan penggabungan angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah sehingga melahirkan indeks pendidikan. Indeks pendidikan atau pengetahuan bernilai 0 (terendah) sampai 100 (tertinggi)

Rumusnya sebagai berikut :

IP : (2/3 X Angka Melek Huruf) + (1/3 X Indeks rerata lama Sekolah)

BPS mengemukakan tahun 2010 UNDP (United Nation Development Program) menetapkan konsep baru IPM. Dalam IPM konsep baru, indeks pendidikan diukur dengan dua komponen yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP. Untuk menghitung RLS digunakan rumus sebagai berikut :

$$HLS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Adapun Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

Dalam menghitung angka harapan lama sekolah (HLS) digunakan Rumus:

$$HLS = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Guna menghitung indikator pendidikan atau Pengetahuan maka digunakan rumus penggabungan sebagai berikut :

$$\text{Pengetahuan} = \frac{\text{HLS} + \text{HLS min}}{2}$$

BAB III

KARAKTERISTIK OBJEK PENELITIAN

3.1 Geografis

Secara geografis, letak Kabupaten Tangerang yang merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Banten berada antara 6 00 – 6 20 Lintang Selatan dan 106 20- 106 43 Bujur timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.

Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan DKI Jakarta hanya sekitar 30 kilometer, yang bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih satu jam. Kedua wilayah tersebut (Tangerang dan DKI Jakarta), dihubungkan dengan jalur lalu lintas darat bebas hambatan, yaitu Jalan Tol Jakarta – Merak yang merupakan jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dan Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Tangerang setelah terbentuknya Kota Tangerang Selatan berdasarkan Undang-Undang No.51 Tahun 2008, Tanggal 26 November 2008, menjadi 992,28 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 2,84 juta jiwa, yang terdiri atas 29 kecamatan, 246 desa dan 28 kelurahan dengan luas terbesar berada di wilayah Kecamatan Rajeg, yaitu 53,70 kilometer persegi atau sekitar 5,60 persen dari luas wilayah Kabupaten Tangerang.

Sedangkan luas wilayah kecamatan paling kecil adalah Kecamatan Sepatan, hanya 17,32 kilometer persegi atau sekitar 1,80 persen dari luas wilayah Kabupaten Tangerang. Sebagian besar wilayah Tangerang merupakan dataran rendah dengan kemiringan tanah rata-rata 0 – 3 per-sen dan ketinggian antara 0 – 85 meter diatas permukaan laut.

Di Tangerang, terdapat sejumlah sungai besar dan kecil yang mengalir dari selatan ke arah utara sesuai arah penurunan permukaan tanah. Sungai-sungai yang terdapat di

Tangerang ialah; Cisadane, Cidurian Cimanceuri, Cirarab, Kali Angke, dan Pesanggarahan. Selain itu, terdapat sejumlah situ atau danau kecil, yaitu; Situ Cipondoh, Situ Kelapa Dua, Situ Pamulang, Situ Gintung, Situ Garukgak, dan Situ Patrasana.

3.2 Iklim Dan Curah Hujan

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas dan kelembaban yang tinggi. Selama tahun 2010, temperatur udara rata-rata mencapai 27,70 Drajat Celcius. Suhu tertinggi pada bulan September, yaitu 34,50 Drajat Celcius dan suhu terendah pada bulan Juli yaitu 23,00 Drajat Celcius. Rata-rata kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 78,0 %.

3.3 Penduduk Dan Mata Penecharian

Penduduk Kabupaten Tangerang bersifat Heterogen, terdiri dari empat etnis, Sunda, Jawa, Betawi, Cina. Dua etnis Sunda dan Jawa merupakan penduduk Mayoritas.

- a. Kelompok etnis Sunda asal muasalnya berasal dari Sumedang, mereka datang ke Tangerang sekitar tahun 1630-an pada pasca pengempuran kota Batavia oleh pasukan Mataram. Kelompok ini mencapai wilayah Tangerang yang meliputi daerah Cikupa, Pasar Kemis, Curug, Tigaraksa, Legok dan Pagadangan sehingga mereka menetap di daerah tersebut, dengan membawa dan mengembangkan Seni dan Budaya yang mereka bawa dari daerah priangan.
- b. Kelompok etnis Jawa mereka datang ke Tangerang sebagai pengikut Fatahilah dari Demak pada tahun 1526 serta kelompok kecil yang gagal mengepung kota Batavia pada tahun 1628. Kelompok ini menetap di wilayah Barat Laut utara menyusuri Pantai Utara Pulau Jawa meliputi tiga kecamatan, yaitu : Mauk, Kresek, dan Rajeg. Dilihat dari segi bahasa dan budaya diperkirakan sebagai keturunan dari sisa-sisa prajurit Mataram, mereka menggunakan bahasa sehari-hari dengan bahasa Jawa, Kelompok ini pada umumnya hidup sebagai petani dan nelayan.
- c. Kelompok etnis Betawi diduga mereka masuk dan menetap di Tangerang sejak daerah Tangerang di kuasai konpeni tahun 1659 dan pada waktu itu Belanda masuk ke Batavia. Kelompok ini sebagian besar menempati sepanjang perbatasan Batavia yaitu : wilayah kecamatan Teluk Naga, Kosambi, Sepatan, dan Pakuhaji, pada umumnya mereka hidup sebagai petani yang sekaligus sebagai pedagang, mereka merupakan petani buah-buahan karena wilayah mereka relative dekat dengan

Batavia, memungkinkan mereka menjual hasil peratanian itu ke Batavia. Jati diri budaya mereka tetap dibawa dan dipelihara, baik kesenia maupun budaya serta adat perkawinan mereka yang tetap di pertahankan.

- d. Kelompok etnis Cina, adanya larangan dari kompeni Belanda untuk orang-orang Cina tinggal di Batavia dan diarahkan ke pesisir, mereka harus berkelompok dalam sebuah kampong, hal ini dimaksudkan agar kompeni mudah mengawasi kegiatan mereka. Orang Cina datang ke Tangerang sukar diketahui dengan pasti setelah Belanda menduduki dan membangun Kota Batavia. Masyarakat cina dapatdigolongkan atas Cinaperanakan dan Cina toto, golongan Cina pernakanorentasi kebudayaan mengarah dan sudah bercampur dengan kebudayaan setempat, seperti pada pemakaian bahasa, makanan dan lainnya tidak berbeda dengan pribumi tetapi kesenian dan kebudayaannya masih tetap dikembangkan sesuai adat leluhur, seperti Coket, Barongsai, dan Dayung yang diikuti oleh pribumi. Etnis Cina banyak menempati daerah utara seperti Teluk Naga dan daerah Kosambi.
- e. Dalam kehidupan sehari-hari orang Sunda berbicara bahasa Sunda dan orang Jawa berbicara bahas Jawa Serang, namun antara kedua etnis ini saling mengerti pergaulan mereka, orang Cina yang menempati daerah Kabupaten Tangerang sangat banyak jumlahnya dan cukup luas penyebarannya, terutama pada jaman colonial dan pola hidup mereka berbaur dengan masyarakat setempat, seperti bertani, berekreasi, seni, budaya, dan perekonomian, khususnya perniagaan.

Dari tahun ke tahun penduduk Cina semakin bertambah. Hasil sensus penduduk pada tahun 1930 menunjukkan penduduk Tangerang berjumlah 196.933 jiwa terdiri dari 108.345 jiwa orang Sunda, 86.921 jiwa orang Melayu Batavia, dan 1667 jiwa campuran dari berbagai etnis, termasuk etnis Cina yang cukup banyak jumlahnya.

3.4 WILAYAH ADMINISTRASI

Luas Wilayah Kabupaten Tangerang 959,61 km² atau 95,961 hektar, ditambah kawasan reklamasi pantai dengan luas ± 9.000 hektar, dengan garis pantai sepanjang ± 51 kilometer. Secara adminstratif Kabupaten Tangerang adalah salah satu daerah tingkat II yang merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Provinsi Banten, wilayah pemerintahan kabupaten Tangerang terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, 28 (dua puluh delapan)

kelurahan dan 246 (dua ratus empat puluh enam) desa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.1.

Tabel 3.1

Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Tangerang

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Presentase
		(Km ²)	(%)
1	Cisoka	26,98	2,81
2	Solear	29,01	3,02
3	Tigaraksa	48,74	5,08
4	Jambe	26,02	2,71
5	Cikupa	42,68	4,45
6	Panongan	34,93	3,64
7	Curug	27,41	2,86
8	Kelapa Dua	24,38	2,54
9	Legok	35,13	3,66
10	Pagedangan	45,69	4,76
11	Cisauk	27,77	2,89
12	Pasar Kemis	25,92	2,7
13	Sindang Jaya	37,15	3,87
14	Balaraja	33,56	3,5
15	Jayanti	23,89	2,49
16	Sukamulya	26,94	2,81
17	Kresek	25,97	2,71
18	Gunung Kaler	29,63	3,09
19	Kronjo	44,23	4,61
20	Mekar Baru	23,82	2,48
21	Mauk	51,42	5,36
22	Kemiri	32,7	3,41
23	Sukadiri	24,14	2,52
24	Rajeg	53,7	5,6
25	Sepatan	17,32	1,81
26	Sepatan Timur	18,27	1,9
27	Pakuhaji	51,87	5,41
28	Teluk Naga	40,58	4,23
29	Kosambi	29,76	3,1
Kabupaten		959,61	100

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam angka Tahun 2017

Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-85 meter diatas permukaan laut, terletak pada 6°00'-6°20' Lintang Selatan dan antara 106°20'-106°43' Bujur Timur. Berdasarkan posisi Kabupaten Tangerang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- ✚ Sebelah Utara : Laut Jawa
- ✚ Sebelah Timur : Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Jakarta Barat.
- ✚ Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor.
- ✚ Sebelah Barat : Kabupaten Serang dan Lebak

3.5 Kondisi Demografi

1. Kependudukan

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Tangerang berdasarkan data dalam angka tahun 2016 sebanyak 3,37 juta jiwa yang terdiri atas 1,72 juta jiwa penduduk laki-laki dan 1,65 juta jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104,81. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang

Kecamatan	Penduduk		Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
Cisoka	48.693	45.423	94.116	107,20
Solear	46.385	44.561	90.946	104,09
Tigaraksa	76.448	73.116	149.564	104,56
Jambe	23.082	21.891	44.973	105,44
Cikupa	144.465	135.320	279.785	106,76
Panongan	69.678	67.247	136.925	103,62
Curug	107.190	100.716	207.906	106,43
Kelapa dua	113.095	114.687	227.782	98,61
Legok	63.011	58.566	121.577	107,59
Pagedangan	58.189	55.549	113.738	104,75
Cisauk	42.261	40.680	82.941	103,89
Pasar Kemis	159.692	154.253	313.945	103,53
Sindang Jaya	47.929	46.044	93.973	104,09
Balaraja	67.756	63.739	131.495	106,30
Jayanti	396956	35.768	432.724	1109,81
Sukamulya	33.548	32.363	65.911	103,66
Kresek	33.319	32.340	65.659	103,03
Gunung Kaler	26.389	26.054	52.443	101,29
Kronjo	31.434	30.055	61.489	104,59
Mekar Baru	19.056	17.975	37.031	106,01
Mauk	41.529	39.997	81.526	103,83
Kemiri	22.896	21.081	43.977	108,61
Sukadiri	29.101	27.098	56.199	107,39

Kecamatan	Penduduk		Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
Rajeg	87.610	83.987	171.597	104,31
Sepatan	61.293	57.239	118.532	107,08
Sepatan Timur	48.717	46.212	94.929	105,42
Pakuhaji	58.728	55.789	114.517	105,27
Teluk Naga	83.553	79.623	163.176	104,94
Kosambi	84.029	78.212	162.241	107,44
Kabupaten Tangerang	2.126.032	1.685.585	3.811.617	126,13

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam angka Tahun 2017

Dalam periode 2010-2016 Kabupaten Tangerang mengalami Pertumbuhan penduduk sebesar 5,97 persen. Angka laju Pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Jayanti sebesar 46,63 persen sedangkan pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Mekar Baru sebesar 0,81 persen dan Kecamatan Mauk sebesar 0,90 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010-2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan (%)
	2010	2016	
Cisoka	79.323	94.116	3,48
Solear	74.360	90.946	4,11
Tigaraksa	120.101	149.564	4,49
Jambe	40.393	44.973	2,17
Cikupa	226.136	279.785	4,35

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan (%)
	2010	2019	
Panongan	97.195	136.925	7,09
Curug	166.905	207.906	4,49
Kelapa dua	179.290	227.782	4,90
Legok	98.803	121.577	4,24
Pagedangan	95.803	113.738	3,49
Cisauk	64.537	82.941	5,15
Pasar Kemis	240.281	313.945	5,49
Sindang Jaya	77.508	93.973	3,93
Balaraja	112.119	131.495	3,24
Jayanti	63.839	432.724	46,63
Sukamulya	59.322	65.911	2,13

Kresek	61.013	65.659	1,48
Gunung Kaler	47.930	52.443	1,82
Kronjo	55.386	61.489	2,11
Mekar Baru	35.567	37.031	0,81
Mauk	77.943	81.526	0,90
Kemiri	40.778	43.977	1,52
Sukadiri	53.330	56.199	1,05
Rajeg	134.204	171.597	5,04
Sepatan	92.993	118.532	4,97
Sepatan Timur	82.124	94.929	2,94
Pakuhaji	104.005	114.517	1,94
Teluk Naga	139.129	163.176	3,24
Kosambi	131.852	162.241	4,24
Kabupaten Tangerang	2.852.169	3.811.617	5,97

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam angka Tahun 2017

b. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Sebagian besar penduduk Kabupaten Tangerang terpusat di Kecamatan Jayanti. Pada Tahun 2016 sekitar 11,35 persen penduduk Kabupaten Tangerang bertempat tinggal di kecamatan tersebut. Sementara luas kecamatan Jayanti secara keseluruhan hanya sekitar 2,49 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.

Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Jayanti, dengan tingkat hunian Pasar Kemis, dengan tingkat hunian 18113 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4,08 orang. Kecamatan yang termasuk cukup padat penduduknya adalah Kecamatan Pasar Kemis yaitu 12112 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kemiri dengan tingkat kepadatan 1346 jiwa/km² dan Kecamatan Kronjo dengan tingkat kepadatan 1390 jiwa/km².

Tabel 3.4

Persebaran dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Persebaran Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Cisoka	2,47	3488
Solear	2,4	3135
Tigaraksa	3,92	3069
Jambe	1,18	1728
Cikupa	7,34	6555

Kecamatan	Persebaran Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Panongan	3,59	3920
Curug	5,45	7585
Kelapa dua	5,98	9343
Legok	3,19	3461
Pagedangan	2,98	2489
Cisauk	2,18	2987
Pasar Kemis	8,24	12112
Sindang Jaya	2,47	2530
Balaraja	3,45	3918
Jayanti	11,35	18113
Sukamulya	1,73	2447
Kresiek	1,72	2528
Gunung Kaler	1,38	1770
Kronjo	1,61	1390
Mekar Baru	0,97	1555
Mauk	2,14	1585
Kemiri	1,15	1345
Sukadiri	1,47	2328
Rajeg	4,50	3195
Sepatan	3,11	6844
Sepatan Timur	2,49	5196
Pakuhaji	3,00	2208
Teluk Naga	4,28	4021
Kosambi	4,26	5452
Kabupaten Tangerang	100,00	3972

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam angka Tahun 2017

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif research dengan pendekatan Phenomologi dan Case Study. Alasan dari pemilihan metode ini adalah agar hasil penelitian mudah untuk dipahami jika penyajiannya dituangkan dalam bentuk naratif, sedangkan pendekatan Phenomologi yakni untuk memotret kejadian yang sudah terjadi pada sektor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk sektor pendidikan di Kabupaten Tangerang, dan Case Study untuk menganalisa permasalahan yang terjadi pada IPM sektor pendidikan tersebut.

4.2 Fokus Penelitian

Rumusan permasalahan atau dalam penelitian kualitatif dikenal dengan fokus penelitian atau kajian yang merupakan masalah umum yang dikaji. Sesuai dengan tujuan dari kajian, maka permasalahan yang menjadi pokok penelitian pada kajian peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Tangerang adalah: mengapa peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Tangerang rendah? apa aja faktor penyebab rendahnya peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Tangerang? Serta, apa program kegiatan prioritas yang dapat meningkatkan indeks pendidikan di Kabupaten Tangerang?.

4.3 Sumber Data dan Responden

Dalam penelitian ini, sumber data atau responden untuk kuesioner atau wawancara adalah SKPD terkait, kepala Sekolah dan penyelenggara pendidikan dan tokoh-masyarakat/agama dan perwakilan masyarakat di Kabupaten Tangerang. Adapun sumber data untuk dokumentasi adalah dokumen yang diperoleh dari berbagai instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Tangerang, dari masyarakat dan berbagai pihak terkait dengan pendidikan di Kabupaten Tangerang.

4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada kajian ini sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan dan kajian terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan sektor pendidikan di Kabupaten Tangerang. Dokumen-dokumen yang dimaksud khususnya dokumen baik dalam bentuk data statistik, photo lapangan, laporan-laporan, hasil kajian dan evaluasi, dan lainnya yang dikumpulkan untuk selanjutnya dikaji dan diteliti.

b. Wawancara mendalam (*indepth interview*).

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menggali informasi dengan melalui percakapan atau pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (interviewer) kepada yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan responden pimpinan dan staf di Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Kepala Sekolah/Madrasah dan Penyelenggara Pendidikan di Kabupaten Tangerang, serta Tokoh Masyarakat/Agama dan perwakilan masyarakat di Kabupaten Tangerang.

c. Pengamatan

Pengamatan merupakan cara melihat dan mengamati langsung kejadian di lokasi kajian, seperti sarana dan prasarana pendidikan, proses pembelajaran dan fakta lainnya di lapangan. Dengan cara ini diharapkan dapat diketahui gambaran kondisi atau fakta, permasalahan dan kebutuhan nyata yang terkait dengan faktor penyebab rendahnya peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Tangerang.

d. *Focuss Group Discussion (FGD)*

Metode lainnya adalah diskusi kelompok terarah *atau focuss group discussion (FGD)* untuk mendiskusikan dan melakukan pendalaman materi rumusan hasil analisis Dalam kajian ini, FGD digunakan untuk mendiskusikan dan mempertajam hasil penelitian yakni mengkaji konsep perencanaan peningkatan indeks pendidikan yang sudah disusun tim ahli untuk mendapat menajaman dengan instansi terkait.

4.5. Metode Analisis

Untuk menganalisis data dalam penelitian dilakukan proses analisis data yang dimulai dengan menelaah dan mempelajari seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari wawancara, pengamatan dan dari dokumen. Kemudian dilakukan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi yakni membuat rangkuman inti. Langkah selanjutnya menyusunnya dalam satuan-satuan serta melakukan katagorisasi dan koding serta pada tahap akhir mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah proses situ baru dilakukan penafsiran data.

Hal ini sejalan dengan teknik analisis interaktif dimana dalam pelaksanaannya dibagi dalam tiga komponen analisis, yaitu:

- 1) Melakukan Reduksi data. Reduksi data ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data kasar yang diambil dari lapangan hasil dari wawancara peneliti dengan subyek penelitian serta pengamatan yang dilakukan langsung oleh peneliti;
- 2) Penyajian data yakni menyajikan data dalam bentuk teks narasi dimulai dari langkah awal penelitian sampai peneliti mengakhiri kegiatan penelitian;
- 3) Penarikan kesimpulan, yaitu melakukan penelitian data secara terus menerus, menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, temuan dan hal-hal yang timbul yang dituangkan dalam kesimpulan.

Untuk mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya peningkatan indeks pendidikan dan merumuskan konsep dan perencanaan program peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Tangerang, maka dilakukan penelusuran permasalahan atau *analisis problem seeking*.

Langkah analisis *problem seeking* ini diawali dengan: pertama, merumuskan tujuan yakni apa yang hendak dicapai melalui peningkatan indeks pendidikan. Langkah kedua adalah mengumpulkan fakta dan menganalisisnya, yakni kondisi realitas pendidikan rendahnya peningkatan indeks pendidikan dan faktor-faktor penyebabnya. Langkah ketiga, adalah menyusun konsep programatik atau cara untuk mengatasi rendahnya peningkatan indeks pendidikan. Langkah keempat adalah merumuskan kebutuhan (needs) yakni merumuskan kebutuhan atau rencana kegiatan prioritas untuk peningkatan indeks pendidikan. Langkah kelima adalah mengidentifikasi permasalahan (*problems*) yang dihadapi dalam peningkatan indeks pendidikan.

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Pembahasan Data Hasil Wawancara

5.1.1 Pembahasan Hasil Wawancara Dengan Orang Tua/Wali Murid

1. Orang Tua yang memiliki anak yang masih sekolah atau sudah lulus sekolah

Wawancara ini dilakukan terhadap 16 orang tua atau wali murid di sekolah-sekolah di Kabupaten Tangerang baik yang memiliki anak yang masih sekolah atau sedang sekolah. Keseluruhan responden yang diwawancarai mengaku mempunyai anak yang sedang sekolah atau sudah lulus sekolah. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1

Orang Tua yang memiliki anak yang masih sekolah atau sudah lulus sekolah

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Iya, punya	16	100%
2	Tidak punya	-	-
	Jumlah	16	100%

Bagi yang orang tua yang memiliki anak yang masih sekolah, maka diperoleh data jenjang pendidikan yang sedang dilalui, rencana melanjutkan pendidikan anaknya sampai ke perguruan tinggi dan sampai jenjang mana mereka menyekolahkan anaknya.

- 1.a. Jenjang pendidikan apa yang sedang di lalui anak-anak.

Terdapat 4 jenjang pendidikan formal yang diikuti oleh anak, yakni mulai jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah dan perguruan tinggi (PT). Berikut ini jenjang pendidikan formal yang diikuti anak :

Tabel 5.2

Jenjang pendidikan apa yang sedang di lalui anak-anak

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	SD/Madrasah Ibtidaiyah	5	31,25 %
2	SMP/MTS	5	31,25 %

3	SMA/MA	3	18,75 %
4	Peguruan Tinggi	3	18,75 %
	Jumlah	16	100 %

Dari 16 orang tua yang memiliki anak yang masih sekolah terdapat 62,50% yang berada di tingkat SD/MI dan SMP/MTS, selebihnya masing-masing 18,75 % yang berpendidikan di SLTA dan Perguruan Tinggi.

1.b. Rencana untuk melanjutkan pendidikan anak sampai perguruan tinggi

Dari 16 orang tua yang diwawancarai tentang keberlanjutan pendidikan anaknya, tampak 37,50 % memiliki keinginan rencana untuk meneruskan sekolah anaknya sampai ke perguruan tinggi. Namun terdapat 62,50 % orang tua yang tidak memiliki rencana untuk meneruskan pendidikan anaknya hingga perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 5.3

Rencana untuk melanjutkan pendidikan anak sampai perguruan tinggi

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya ada rencana	6	37,50 %
2	Tidak ada rencana (hanya sampai SMU)	10	62,50%
		16	100 %

Hal ini menunjukkan harapan sekolah anak-anak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi masih kurang dan perlu ada peningkatan.

1.c. Jenjang pendidikan yang telah diikuti bagi anak yang sudah tidak sekolah.

Bagi orang tua yang memiliki anak yang sudah tidak sekolah atau sudah menamatkan sekolahnya, umumnya hanya sampai jenjang pendidikan SMA, hal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.4

Jenjang pendidikan yang telah diikuti bagi anak yang sudah tidak sekolah

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Lulus PT	-	
2	Lulus SMA/MA	12	100 %
3	Lulus SD/SMP	-	
		12	100 %

1.d. Alasan Orang Tua menyekolahkan anaknya sampai SLTA

Ketika ditanyakan apa alasan orang tua hanya menyekolahkan anaknya sampai lulus SLTA, ada beberapa alasan yang dikemukakan para orang tua sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.5

Alasan orang tua menyekolahkan anaknya sampai SPM/SMU

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Anaknya ingin mandiri/kerja	6	50 %
2	Kurangnya biaya	6	50%
	Jumlah	12	100 %

Dari data pada tabel di atas, tamak ada 2 alasan utama yang menjadikan orang tua hanya menyekolahkan anaknya hingga SLTA. 50 % orang tua menyatakan karena faktor keinginan anaknya untuk bekerja, dan 50 % adalah karena faktor kurangnya biaya untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi yakni ke perguruan tinggi.

2. Kepercayaan orang tua/wali tentang peran pendidikan dalam merubah masa depan keluarga dan anak lebih baik.

Kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya memiliki peran yang sangat penting terhadap pendidikan anak. Demikianlah halnya kepercayaan orang tua bahwa pendidikan memiliki peran dalam merubah masa depan yang lebih baik bagi ekonomi dan kehidupan anak dan keluarganya dapat mendorong orang tua untuk mendorong anak-anaknya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dari 16 responden yang diwawancarai diperoleh gambaran kepercayaan orang tua terhadap pentingnya pendidikan dan alasannya sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.6

Kepercayaan Orang Tua/wali tentang peran pendidikan dalam merubah masa depan keluarga dan anak lebih baik.

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Tidak percaya	-	
2	Percaya,	16	100 %

Alasan percaya pentingnya pendidikan :			
1.	Anak jadi pintar dan trampil	4	25 %
2.	Punya ijazah dan bisa kerja	6	37,5 %
3.	Bisa membantu keluarga	3	18,75%
4.	Anak dapat mengikuti tuntutan zaman	3	18,75%
	Jumlah	16	100 %

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa keseluruhan orang tua (100%) yang menjadi responden studi ini percaya pentingnya peran pendidikan dalam merubah masa depan anak dan keluarga yang lebih baik. Dari keseluruhan orang tua yang memandang pentingnya pendidikan, dengan beberapa alasan yaitu yang terbesar atau 37,5% karena dengan sekolah dapat memiliki ijazah dan bekerja, 25 % menyatakan karena alasan anak dapat menjadi pintar dan memiliki ketrampilan, lainnya adalah bisa membantu keluarga dan anak dapat menyesuaikan diri dengan tantangan dan kebutuhan zaman masing-masing 18,75 %.

3. Orang tua/wali yang memiliki cita-cita menyekolahkan anaknya hingga kuliah
Bila dilihat anak yang sudah menamatkan sekolahnya yang umumnya sampai SLTA, maka hal ini berbeda dengan cita-cita dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.7

Cita-cita orang tua/wali untuk menyekolahkan anaknya hingga kuliah

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ada cita-cita	16	100 %
2	Tidak ada cita-cita	-	
	Jumlah	16	100 %

Dari tabel di atas diperoleh gambaran tentang cita-cita orang tua dalam pendidikan anak-anaknya. Tampak keseluruhan orang tua memiliki cita-cita untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga dapat kuliah dan menamatkan pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan harapan yang tinggi dari orang tua terhadap pendidikan anaknya sekaligus menunjukkan kesadaran yang tinggi yang dimiliki orang tua terhadap pentingnya pendidikan.

4. Pendapat orang tua/wali tentang aspek yang paling penting dalam pendidikan anak
Untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga sampai ke tingkat yang tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini pendapat para orang terhadap faktor yang paling penting dalam pendidikan anak:

Tabel 5.8

Pendapat orang tua/wali tentang faktor yang paling penting dalam pendidikan anak

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Biaya	9	56,25 %
2	Kemauan Anak	7	43,75 %
3	Lainnya	-	
	Jumlah	16	100 %

Menurut orang tua yang menjadi responden faktor yang paling penting terhadap pendidikan anak adalah aspek biaya dan aspek kemauan anak. Orang tua memiliki peran juga terhadap pendidikan anaknya, akan tetapi bila kemauan anaknya kurang maka pendidikan anak juga dapat terhenti atau tidak berhasil. Demikian halnya dengan biaya yang tidak dapat dipungkiri pentingnya terhadap pendidikan, karena memang untuk menyekolahkan anak apalagi hingga hingga perguruan tinggi membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

5. Pendapat orang tua/wali tentang keberhasilan program pendidikan di Tangerang

Dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu wilayah atau Kabupaten, peran yang paling utama adalah pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten. Di samping ikut mengeluarkan kebijakan pendidikan di daerahnya, Pemda juga memiliki program pendidikan yang khusus diterapkan di wilayahnya, di samping program dari pusat. Berikut ini pendapat para orang tua tentang sejauhmana keberhasilan program-program pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Tangerang :

Tabel 5.9

Pendapat orang tua/wali tentang keberhasilan program pendidikan
di Kabupaten Tangerang

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat berhasil (efektif) dan baik)	1	6,25 %
2	Cukup berhasil (efektif dan baik)	9	56,25%
3	Agar ditingkatkan lagi	6	37,50%
	Jumlah	16	100 %

Dari tabel di atas, diperoleh gambaran tentang pendapat orang tua atau masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kabupaten Tangerang yang sebagian atau 56,25% masyarakat atau orang tua menyatakan cukup berhasil dan ada dan 6,25 % sangat berhasil. Sementara ada 37,50 % orang tua atau masyarakat yang mengharapkan agar ada upaya-upaya peningkatan alam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tangerang.

7. Harapan orang tua/wali terhadap pendidikan di Kabupaten Tangerang

Sebagai bagian dari masyarakat di Kabupaten Tangerang, maka orang tua wali murid juga mengharapkan adanya keberhasilan dan peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya. Terdapat beberapa usulan dan harapan untuk meningkatkan dan memajukan pendidikan di Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

Tabel 5.10

Harapan orang tua/wali terhadap pendidikan di Kabupaten Tangerang

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Menambah sarana dan fasilitas pendidikan	7	43,75 %
2	Tenaga pendidik di daerah terpencil	1	6,25 %
3	Peningkatan Guru yang berkualitas	1	6,25 %
4	Peningkatan kualitas pendidikan (lulusan sekolah)	1	6,25 %
5	Biaya sekolah tidak memberatkan/dikurangi/dihapus	2	12,50%
6	Sekolah gratis hingga SMA	2	12,50%
7	Lebih memperhatikan pendidikan di daerah terpencil	1	6,25%
	Jumlah	16	100 %

Dari tabel di atas diperoleh gambaran tentang beberapa usulan dan masukan dari orang tua atau masyarakat tentang upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Tangerang yaitu menambah sarana dan fasilitas pendidikan yang diusulkan oleh 43,75 %, selanjutnya usulan-usulan peningkatan kualitas tenaga pendidik, penambahan tenaga pendidik di daerah terpencil, peningkatan kualitas lulusan pendidikan,

biaya sekolah tidak memberatkan/dikurangi/digratiskan, sekolah gratis untuk SMA, dan perhatian khusus atau memberikan prioritas pada pendidikan di daerah/desa terpencil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua wali murid dapat di sarikan kepada beberapa hal : *Pertama*, bahwa umumnya wali murid memiliki anak baik yang sudah lulus sekolah maupun sedang sekolah mulai tingkat SD/MI, SMP/MTS maupun di SMA/MA. Para orang tua yang memiliki anak sedang menjalani sekolah itu tampak hanya sebagian kecil saja yang memiliki rencana untuk meneruskan sekolahnya sampai ke perguruan tinggi. Sebagian besar mereka atau 62,50 % orang tua tidak memiliki rencana untuk meneruskan pendidikan anaknya hingga perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan harapan sekolah anak-anak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi masih kurang.

Sejalan dengan itu, menurut informasi orang tua yang memiliki anak yang sudah tidak sekolah atau sudah menamatkan sekolahnya, umumnya hanya sampai jenjang pendidikan SMU. Alasan Orang Tua menyekolahkan anaknya hanya sampai SLTA, sebagian karena faktor keinginan anaknya untuk bekerja, dan dan sebagian lagi karena faktor kurangnya biaya untuk menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi.

Kedua, hampir seluruh orang tua yang menjadi responden ini berpendapat bahwa pendidikan memiliki peran dalam merubah masa depan yang lebih baik bagi ekonomi dan kehidupan anak dan keluarganya. Ada beberapa beberapa alasan atas pendapat ini, diantaranya dengan sekolah anak dapat memiliki ijazah dan bekerja, anak juga dapat menjadi pintar dan memiliki ketrampilan, serta dengan ilmu yang dimiliki, anak dapat menghadapi tantangan dan kebutuhan yang sesuai dengan zamannya.

Ketiga, menurut para orang tua, untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga sampai ke tingkat yang tinggi ditentukan oleh beberapa faktor. Yang paling penting dibutuhkan dalam menyekolahkan anak adalah faktor biaya dan aspek kemauan anak.

Keempat, mengenai pendapat mereka terhadap penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kabupaten Tangerang, sebagian besar orang tua atau masyarakat memandang cukup berhasil. Namun demikian mereka juga mengharapkan agar ada upaya-upaya peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tangerang. Untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Tangerang mereka mengusulkan untuk menambah sarana dan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, penambahan tenaga pendidik di daerah terpencil, peningkatan kualitas lulusan pendidikan, biaya sekolah tidak

memberatkan/dikurangi/digratiskan, sekolah gratis untuk SMA, dan perhatian khusus atau memberikan prioritas pada pendidikan di daerah/desa terpencil.

5.1.2 Pembahasan Hasil Wawancara dengan Guru, Kepala Sekolah, Tokoh Masyarakat dan Pelaku Pendidikan Lainnya

Dalam upaya menggali data tentang pelaksanaan pendidikan dan mengetahui permasalahan serta faktor penyebab rendahnya indek pendidikan di Kabupatenn Tangerang maka dilakukan wawanca mendalam kepada perwakilan guru, kepala sekolah, lembaga/yayasan pendidikan dan pelaku pendidikan dan pihak pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan di wilayah ini. Berikut ini pembahasan hasil wawancara yang dilakukan.

1. Tata Cara Pendaftaran Sekolah

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pendidikan adalah terkait dengan pendaftaran murid baru di sekolah atau madarasah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

1.a. Tatacara dan Prosedur pendaftaran murid baru

Menurut informasi yang disampaikan oleh responden, tatacara pendaftaran yang umum berlaku di sekolah-sekolah yang terdapat di Kabupaten Tangerang adalah dengan cara orang tua/wali murid bersama calon peserta didik mendatangi sekolah dan kemudian mengisi formulir pendaftaran ke sekolah langsung. Hal ini berlaku untuk keseluruhan pendeftaran yang berlaku di sekolah-sekolah yang terdapat di Kabupaten Tangerang, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.11

Tatacara dan prosedur pendaftaran murid baru

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Wali murid dan Murid Mendaftar Ke sekolah	16	100 %
2	Lainnya		
	Jumlah	16	100 %

1.b. Pendapat Responden tentang cara pendaftaran murid baru

Sejauhmana pendaftaran sekolah ini dapat dilaksanakan secara efektif, hal ini dapat dilihat dari pendapat responden tentang kemudahan dan efektifitas pelaksanaan tata cara pendaftaran yang ada, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel.512

Pendapat responden tentang cara pendaftaran murid baru

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mudah dan efektif	10	62,50 %
2	Kurang efektif sering menimbulkan antrean	6	37,50%
	Jumlah	16	100 %

Dari tabel di atas, menunjukkan ada dua pendapat yang berbeda dalam menilai tata cara pendaftaran peserta didik baru, dimana menurut sebagian responden yakni 62,50 % menilai pendaftaran yang ada sudah mudah dan efektif, dan sebagian lagi yakni 37,50 % kurang efektif karena sering menimbulkan antrean.

1.c. Usulan peningkatan cara pendaftaran siswa baru

Dalam upaya peningkatan cara pendaftaran peserta didik baru agar lebih efektif dan efisien, maka diusulkan hal-hal sebagai berikut :

Tabel 5.13

Usulan peningkatan cara pendaftaran siswa baru

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sosialisasi cara dan persyaratan pendaftaran kepada masyarakat	6	37,50%
2	Cara online dan membuka website sekolah	10	62,50 %
	Jumlah	16	100 %

Dari tabel di atas diperoleh gambaran tentang adanya usulan yang bisa dipertimbangkan untuk meningkatkan efektifitas pendaftaran peserta didik baru, yaitu 62,50 % responden mengusulkan dalam pendaftaran peserta didik baru sebelumnya perlu sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara dan persyaratan pendaftaran siswa baru. Terdapat pula adanya usulan cara pendaftaran secara online dan membuka website sekolah.

2. Cara pembiayaan Sekolah

Salah satu aspek yang terkait dengan pendidikan, adalah aspek pembiayaan. Berikut ini gambaran tentang cara pembiayaan sekolah menurut responden.

2.a. Cara pembiayaan sekolah

Untuk pembiayaan pendidikan sekolah, maka keseluruhan responden menyatakan untuk mendukung program wajib belajar (wajib) 9 tahun maka pembiayaan sekolah untuk SD dan SLTP dilakukan secara gratis. Responden secara keseluruhan berpendapat bahwa model pembiayaan ini meringankan orang tua siswa, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.14

Pendapat responden untuk pembiayaan sekolah

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Meringankan siswa	16	100%
2	Memberatkan	-	
	Jumlah	16	100%

2.b. Usulan cara pembayaran sekolah

Namun demikian bahwa pembiayaan melalui program BOS ini baru sampai pada SD-SLTP saja, dan baru untuk pembiayaan pengganti SPP sementara untuk tingkat SLTA dan biaya lainnya masih di tanggung oleh orang tua. Untuk itu maka ada usulan-usulan untuk pembiayaan ke depan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.15

Usulan cara pembayaran sekolah

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Usulan SMA gratis	6	37,50%
2	Biaya lainnya gratis	6	37,50%
3	Program baru untuk meringankan biaya sekolah	4	25 %
	Jumlah	16	100 %

3. Profesionalitas dan peningkatan kemampuan guru di sekolah

Aspek guru juga merupakan aspek yang penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Untuk itu maka dalam kajian ini juga dilakukan kajian terhadap kondisi dan profesionalisme guru di sekolah-sekolah.

3.a. Profesionalitas guru di sekolah

Profesionalisme merupakan kemampuan dan keahlian guru untuk melaksanakan tugas dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Berikut ini profesionalisme guru di sekolah-sekolah yang terdapat di kabupaten Tangerang. Menurut keseluruhan responden, secara umum guru-guru yang sudah ada sudah cukup profesional. Ada beberapa alasan profesionalitas guru di sekolah sebagai berikut :

Tabel 5.16

Alasan profesionalitas guru di sekolah

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengajar sesuai bidang keahliannya	12	75 %
2	Pendidikan umumnya lulus S1	4	25 %
3	Lainnya	-	
	Jumlah	16	100 %

Menurut responden profesionalitas guru yang ada di wilayah ini umumnya sudah profesional yakni 75 % menyatakan cukup profesional karena para guru umumnya mengajar sudah sesuai dengan keahliannya dan 25% menyatakan karena pendidikan guru yang ada umumnya lulus strata 1 dan strata 2.

3.b. Usulan peningkatan kemampuan dan profesionalitas guru di sekolah

Untuk peningkatan profesionalisme guru di sekolah, maka kedepan perlu adanya upaya-upaya peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.17

Usulan peningkatan profesionalitas guru di sekolah

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Peningkatan kemampuan mengajar	5	31,25 %
2	Penugasan sesuai bidang keahliannya	4	25 %
3	Guru harus lulus S1-S3	1	6,25 %
4	Peningkatan kualitas guru di sekolah terpencil	6	37,50%
	Jumlah	16	100 %

Dari tabel di atas diperoleh gambaran tentang masukan dan usulan dari responden dalam rangka peningkatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme guru. Peningkatan dan

penempatan guru di tempat-tempat terpececil merupakan usulan diajukan oleh 37,50 % responden. Kemudian 31,25 % responden mengusulkan untuk melakukan peningkatan kualitas guru-guru di daerah terpencil dan lainnya adalah penugasan guru sesuai keahliannya serta perlu adanya peningkatan kelulusan guru yang harus Srata 1 dan 2,

4. Sarana dan fasilitas sekolah

Aspek lainnya yang memiliki peran penting dalam pendidikan adalah aspek sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas ini mencakup gedung dan kantor sekolah, laboratorium untuk praktek, sarana olahraga, seni, alat peraga dan lainnya.

4.a. Kelengkapan sarana dan fasilitas sekolah

Menurut responden yang diwawancara diperoleh gambaran tentang kondisi kelengkapan sarana dan fasilitas sekolah di Kabupaten Tangerang sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.18

Kelengkapan sarana dan fasilitas sekolah

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat lengkap dan memadai	-	-
2	Cukup lengkap dan memadai	1	6,25 %
3	Kurang lengkap dan memadai	15	93,73 %
4	Tidak lengkap dan memadai		
	Jumlah	16	100 %

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa 15 orang atau 93,75 % responden menyatakan sarana dan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tangerang kurang lengkap. Sementara hanya 6,25 % saja responden yang menyatakan cukup lengkap. Hal ini menunjukkan perlunya ada peningkatan sarana dan fasilitas pendidikan yang terdapat di Kabupaten Tangerang.

Menurut Responden, sarana dan fasilitas pendidikan yang kurang tersebut terutama di wilayah pelosok desa yang umumnya sarana dan fasilitasnya tidak selengkap di wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan program pengembangan dan peningkatan sarana dan fasilitas pendidikan lebih di prioritaskan untuk meningkatkan dan melengkapi sarana dan fasilitas pendidikan wilayah pedesaan.

4.b. Usulan untuk peningkatan sarana dan fasilitas sekolah

Sehubungan dengan masih kurangnya sarana dan fasilitas sekolah, maka diusulkan adanya upaya-upaya sebagaimana tabel di bawah ini ;

Tabel 5.19

Usulan untuk peningkatan sarana dan fasilitas sekolah

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pemerataan peningkatan sarana dan fasilitas antar sekolah	4	25 %
2	Prioritas peningkatan sarana fasilitas pendidikan di sekolah terpencil	12	75 %
	Jumlah	16	100 %

Dari tabel di atas diperoleh gambaran tentang usulan dari responden dalam peningkatan sarana dan fasilitas sekolah adalah menurut 12 orang atau 75 % responden mengusulkan perlunya peningkatan sarana dan fasilitas sekolah yang diprioritaskan wilayah pedesaan. Sementara itu terdapat 25% responden yang mengusulkan adanya program pemerataan sarana dan fasilitas sekolah baik antar sekolah maupun antar daerah, sehingga keseluruhan sekolah dan fasilitas pendidikan di setiap kecamatan dan di setiap sekolah meningkat dan maju.

5. 1.3 Cara pelaksanaan ujian sekolah

5.a. bagaimana cara pelaksanaan ujian sekolah

Untuk menentukan kelulusan peserta didik, pada setiap akhir tahun dilaksanakan ujian sekolah. Menurut informasi dari responden, pelaksanaan ujian sekolah mengikuti ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana untuk ujian sekolah dasar masih dengan cara tertulis, sementara itu untuk ujian sekolah menengah sudah menggunakan komputerisasi.

5.b. Pendapat responden tentang pelaksanaan ujian sekolah

Berikut ini tabel tentang pendapat responden mengenai pelaksanaan ujian sekolah yang dilaksanakan di sekolah-sekolah di Kabupaten Tangerang :

Tabel 5.20
Efektifitas pelaksanaan ujian sekolah

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat efektif	2	12,50%
2	Cukup efektif	14	87,50%
3	Kurang efektif	-	
4	Tidak efektif	-	
	Jumlah	16	100 %

Menurut mayoritas responden yakni 87,50% responden, pelaksanaan ujian sekolah yang berlangsung sekarang ini di Kabupaten Tangerang umumnya menyatakan sudah cukup efektif dan sementara itu terdapat 12,50 5 responden menyatakan sangat efektif.

5.c. Usulan untuk peningkatan ujian sekolah

Menurut umumnya responden bahwa dalam upaya peningkatan ujian sekolah yang dilaksanakan di sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang di samping terus mengembangkan sistem koputerisasi sesuai kebutuhan, maka perlu terus dikembangkan sistem ujian sekolah yang lebi efektif.

5.1.4 Program wajib belajar 9 tahun

Salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, termasuk di Kabupaten Tangerang adalah program wajib belajar. Pada UU No.4 tahun 1950 sebagai landasan pendidikan dan pengajaran di sekolah berkaitan dengan wajib belajar bab VI, pasal 10 ayat 1:“semua anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah sedikitnya 6 tahun lamanya”. Pasal 10 Ayat 2: “belajar di sekolah beragama yang telah mendapatkan pengakuan dari menteri agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar” . Hal tersebut kemudian diperkuat dengan undang-undang system pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 20013 pada pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Selanjutnya pada pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

Tujuan wajib belajar adalah mencerdaskan semua masyarakat, menyiapkan SDM masa depan, membina penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 terdapat sasaran yang ingin dicapai yaitu pembekalan kemampuan dasar yang dapat dikembangkan melalui kehidupan, serta kemampuan dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian maka sasaran program wajar 9 tahun adalah agar seluruh warga masing-masing memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar bagi masyarakat untuk mendapat kehidupan yang layak dan dapat berperan serta dalam pembangunan.

6.a. Efektifitas pelaksanaan program wajib belajar

Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, maka dilakukan wawancara kepada guru, kepala sekolah, lembaga kependidikan, staf pemerintahan terkait di Kabupaten Tangerang, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.21

Efektifitas Pelaksanaan program wajib belajar

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sudah terlaksana dengan efektif	2	12,50%
2	Belum terlaksana dengan efektif	14	87,50%
	Jumlah	16	100 %

Hasil dari wawancara, maka penilaian responden dapat dikategorikan pada penilaian sudah terlaksana secara efektif dan belum terlaksana secara efektif. Terdapat 12,50 % responden yang menyatakan pelaksanaan wajar 9 tahun sudah efektif, akan tetapi umumnya responden yakni 87,50% menyatakan belum efektif.

6.b. Faktor penghambat program wajar 9 tahun

Beberapa faktor yang menjadi kendala dan penghambat dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun dikemukakan oleh responden. Kendala dan faktor penghambat tersebut diantaranya :

- ✚ Kesadaran sebagian warga masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya pendidikan
- ✚ Pelaksanaan program kurang didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai, dimana secara umum kondisi sarana dan fasilitas pendidikan dari tingkat SD sampai SLTA masih kurang memadai.

- ✚ Kondisi sarana dan fasilitas dan guru di daerah terpencil yang masih belum memadai. Tampak ada kesenjangan antara sarana-fasilitas dan guru di sekolah-sekolah di wilayah kota dengan di daerah-daerah pelosok.

6.c. Usulan untuk peningkatan efektifitas program wajar 9 tahun

Kendala dan permasalahan di seputar pelaksanaan program wajib belajar di Kabupaten Tangerang ini perlu diatasi dan dipecahkan sehingga pelaksanaan program pendidikan ini dapat diselenggarakan secara efektif. Terdapat beberapa usulan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program wajar 9 tahun sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.22

Usulan untuk peningkatan efektifitas program wajar 9 tahun

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sosialisasi kepada masyarakat agar warga menegetahui pentingnya wajib belajar 9 tahun	1	6,25 %
2	Harus meningkatkan SDM (guru dan lainnya) di daerah terpencil	12	&% %
3	Pemerataan sarana, fasilitas dan guru antara kota dengan daerah terpencil/pedalaman	2	12,59%
4	Prioritan mengurangi ketertinggalan pendidikan khusus di desa-desa terpencil	1	6,25 %
	Jumlah	16	100 %

Usulan responden untuk peningkatan pogram wajar 9 tahun diantaranya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas guru terutama di daerah terpencil, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya program wajar 9 tahun, pemerataan sarana, fasilitas dan guru antara sekolah di perkotaan dan daerah pedesaan atau terpencil serta ada prioritas pembangunan untuk mengangkat ketertinggalan pendidikan di daerah terpencil.

5.1.5 Pemerataan Pendidikan

Dalam UU No.4 tahun 1950 sebagai landasan pendidikan dan pengajaran di sekolah bab XI, Pasal 17 : “*Tiap-tiap warga negara RI mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah tersebut terpenuhi*”. Hal ini menunjukkan perlunya pemerataan pendidikan untuk semua warga negara Indonesia tanpa kecuali. Pemerataan pendidikan mencakup adanya kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak dan warga baik kaya dan miskin bila dilihat dari sisi ekonomi, atau yang di desa dan di kota bila dilihat dari sisi letak geografis tempat tinggalnya serta segala status lainnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan, memperoleh pelayanan, memperoleh pengajaran dari guru yang berkualitas serta dapat sekolah di sekolah berkualitas dengan sarana dan fasilitas yang memadai.

6.a. Pelaksanaan pemerataan pendidikan pendidikan

Salah satu amanat dary Undang-Undang adalah memberikan hak yang sama kepada setiap warga untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk mengetahui sejauhmana pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Tangerang ini sudah merata atau belum, maka dilakukan wawancara dengan responden, dimana keseluruhan responden menyatakan bahwa pemerataan pendidikan belum terlaksana dengan baik dan efektif, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.23

Pelaksanaan pemerataan pendidikan antara kota dan desa

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sudah terlaksana dengan efektif	-	
2	Belum terlaksana dengan efektif	16	100 %
	Jumlah	16	100 %

6.b. Alasan Pemerataan pendidikan belum terwujud

Para responden tampak lebih menyoroti alasan pemerataan pendidikan yang belum terwujud dengan melihat antara keagaan pendidikan di wilayah perkotaan dengan di daerah-daerah pelosok, dimana faktor penyebab pemerataan pendidikan belum terlaksana efektif umumnya karena : (a) Pendidikan (sarana, fasilitas, guru dan lainnya) di daerah terpencil minim/banyak kekurangan, (b) akses menuju dan di daerah pedesaan masih sulit dan kurang. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.24

Alasan pemerataan pendidikan belum terwujud

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pendidikan (sarana, fasilitas, guru dan lainnya) di daerah terpencil minim/banyak kekurangan	15	93,75%
2	Akses ke pedesaan sulit	1	6,25%
	Jumlah	16	100%

6.c. Cara meningkatkan pemerataan Pendidikan

Untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Tangerang, terdapat beberapa usulan dari responden sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.25

Cara meningkatkan pemerataan Pendidikan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Mengevaluasi dan memperhatikan pendidikan di daerah terpencil	9	56,25%
2	Pemerataan dan perbaikan sarana dan fasilitas	3	18,75%
3	Pemerataan dan peningkatan tenaga pengajar	1	6,25 %
4	Pembiayaan murah dan kemudahan masuk pendidikan	1	6,25%
5	Pemerataan dan tanpa ada perbedaan dalam pendidikan	2	12,50%
	Jumlah	16	100 %

Menurut responden ada beberapa usulan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan yaitu : mengevaluasi dan memperhatikan pendidikan di daerah terpencil, pemerataan dan perbaikan sarana dan fasilitas, pemerataan dan peningkatan tenaga pengajar, pembiayaan murah dan kemudahan masuk pendidikan, pemerataan tanpa ada perbedaan dalam pendidikan.

5.1.6 Pendidikan untuk keluarga miskin/prasejahtera

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi keluarga. Di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tangerang masih cukup banyak terdapat keluarga miskin atau pra sejahtera. Salah satu yang mendapat perhatian dalam pendidikan di Kabupaten ini adalah bagaimana agar keluarga miskin ataupun keluarga pra sejahtera mendapatkan pendidikan yang sama dengan kelompok ekonomi masyarakat lainnya.

7.a. Keluarga miskin sudah dapat menyekolahkan anaknya dengan baik

Salah satu pertanyaan yang dikemukakan kepada responden untuk mengetahui sejauhmana anak dari keluarga miskin dapat menyekolahkan anaknya dengan baik di Kabupaten Tangerang. Berikut ini jawaban dari responden :

Tabel 5.26

Pelaksanaan pendidikan untuk keluarga miskin terlaksana baik

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya, Sudah	11	96,75%
2	Belum	5	31,25 %
	Jumlah	16	100 %

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa sebagian besar yakni 11 orang atau 96 % responden menyatakan ya, artinya menurut mereka keluarga miskin sudah mendapat pendidikan dengan baik. Namun ada 5 orang atau 31,25 % responden yang menyatakan bahwa keluarga miskin belum memperoleh pendidikan yang baik atau sama dengan keluarga lainnya.

7.b. Alasan Pendapat Responden

Terdapat beberapa alasan dari responden terhadap jawaban mereka, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.27

Alasan pendidikan keluarga miskin sudah/belum berjalan dengan baik

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Motivasi dan keinginan kuat orang tua	7	43,75 %
2	Kemampuan ekonomi yang lemah	5	31,25%
3	Banyaknya sekolah	3	18,75%
4	Di desa dan kota sudah ada sekolah	2	12,50%

	Jumlah	16	100 %
--	--------	----	-------

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran yang menjadi alasan mengapa pendidikan untuk keluarga miskin/prasejahtera sudah berjalan baik. Alasannya diantaranya karena motivasi dan keinginan kuat orang tua, banyaknya sekolah, di desa dan perkotaan sudah ada sekolah. Sementara untuk yang menyatakan bahwa pendidikan untuk keluarga miskin/prasejahtera belum terlaksana secara baik memiliki alasan karena kemampuan ekonomi yang lemah, sementara pendidikan membutuhkan biaya.

7.c. Usulan untuk meningkatkan pendidikan bagi warga miskin/pra sejahtera

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden terdapat beberapa usulan untuk meningkatkan pendidikan bagi keluarga miskin/pra sejahtera. Usulan itu sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.28

Usulan untuk meningkatkan pendidikan bagi warga miskin/pra sejahtera

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Pemerataan pendidikan di kota dan pedesaan	12	75%
2	Sosialisasi wajib belajar 9 tahun, kejar paket dan BOS kepada masyarakat	2	12,5%
3	Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan	2	12,%%
	Jumlah	16	100%

Dari tabel di atas, diperoleh adanya usulan untuk meningkatkan pendidikan bagi keluarga miskin/prasejahtera diantaranya pemerataan pendidikan di kota dan pedesaan, sosialisasi program wajib belajar 9 tahun, BOS dan kejar Paket agar diketahui masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

5.1.7 Pendidikan di pelosok desa

Mengacu pada pendapat para ahli bahwa tentang adanya kendala dalam pelaksanaan pendidikan di setiap daerah, yang salah satunya adalah kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dengan pendidikan di wilayah pelosok desa.

Kabupaten Tangerang sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Banten yang wilayahnya terdiri dari wilayah kota dan juga pedesaan,. Oleh karena itu untuk mempertajam kajian terhadap pendidikan di Kabupaten ini, maka diajukan pertanyaan sejauhmana pelaksanaan pendidikan di pelosok desa kepada para informan, kemudian apa alasan dari persepsi informan dan apa usulan-usulan untuk meningkatkan pendidikan di pelosok desa.

8.a. Apakah masyarakat di pelosok desa dapat menyekolahkan anaknya dengan baik

Pertanyaan itu disampaikan kepada responden dimana responden memberikan jawaban sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 5.29

Masyarakat di pelosok desa dapat menyekolahkan anaknya dengan baik

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya, Sudah	-	
2	Belum	16	100%
	Jumlah	16	100%

Mengacu pada tabel di atas, menunjukan keseluruhan responden menjawab bahwa masyarakat desa belum dapat menyekolahkan anaknya dengan baik.

8.b. Alasan kurangnya pendidikan bagi masyarakat di pelosok desa

Menurut responden ada beberapa hal yang menjadi alasan bahwa masyarakat di pelosok desa belum dapat menyekolahkan anaknya dengan baik. Alasan tersebut sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.30

Alasan masyarakat di pelosok desa belum dapat menyekolahkan anaknya dengan baik

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Faktor ekonomi	14	87,50 %
2	Sarana dan fasilitas sekolah terbatas	2	12,50%
	Jumlah	16	100 %

Alasan masyarakat desa belum dapat menyekolahkan anaknya dengan baik disebabkan oleh faktor-faktor terutama permasalahan ekonomi terutama bagi masyarakat pelosok desa yang berasal dari keluarga pra sejahtera. Kemudian terdapat pula responden yang beralasan karena sarana dan fasilitas sekolah di pelosok desa yang terbatas.

8.c. Cara meningkatkan pendidikan di pelosok desa

Untuk memecahkan permasalahan pendidikan bagi masyarakat di pelosok desa, maka ada beberapa usulan dan masukan dari responden yaitu :

Tabel 5.31

Cara meningkatkan pendidikan di pelosok desa

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Peningkatan SDM pelaku pendidikan di pelosok desa	7	43,75%
2	Memperbanyak sekolah/renovasi sekolah di pelosok	4	25 %
3	Sosialisasi pentingnya pendidikan ke orang tua di pelosok desa	4	25 %
4	Peningkatan ekonomi masyarakat	1	6,25 %
	Jumlah	16	100 %

Dari dari tabel di atas, diperoleh gambaran beberapa usulan untuk meningkatkan pendidikan di pelosok desa, yang terbanyak adalah usulan untuk meningkatkan SDM pelaku pendidikan di pelosok desa, kemudian memperbanyak sekolah dan merenovasi sekolah di pelosok desa, sosialisasi pentingnya pendidikan kepada orang tua di pelosok desa dan peningkatan ekonomi masyarakat di pelosok desa.

5.1.8 Pemasalahan anak putus sekolah

Anak putus sekolah merupakan salah satu permasalahan dalam pendidikan yang mempengaruhi indeks pendidikan. Kejadian anak putus sekolah terjadi baik pada proses pendidikan di SD/MI, SMP/MTS maupun SMA/MA, dimana di tengah-tengah perjalanan mengikuti pendidikannya mereka keluar dari sekolah dan tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah pada jenjang pendidikannya hingga lulus dari sekolahnya.

Menurut data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, anak putus sekolah ini masih banyak terjadi di Kabupaten Tangerang. Hal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap indeks pendidikan di Kabupaten ini. Dalam kerangka mengetahui kondisi dan permasalahan anak putus sekolah di Kabupaten Tangerang, maka dilakukan wawancara kepada informan, sehingga diperoleh kondisi dan faktor penyebab anak putus sekolah dan aspirasi atau usulan pelaku pendidikan tentang cara-cara memecahkannya.

9.1. Keberadaan anak putus sekolah di masyarakat

Untuk mengetahui keberadaan anak putus sekolah, maka dilakukan wawancara terhadap para pelaku pendidikan di Kabupaten Tangerang diantaranya kepada pihak guru, kepala sekolah dan pelaku pendidikan lainnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa keseluruhan informan memberikan pernyataan bahwa kejadian anak putus sekolah masih terjadi di sekolah-sekolah yang terdapat di Kabupaten Tangerang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.32

Keberadaan anak putus sekolah di masyarakat

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ya, masih	16	100 %
2	Tidak	-	-
	Jumlah	16	100%

9.2. Alasan terjadinya Anak Putus Sekolah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya anak putus sekolah. Menurut responden terjadinya putus sekolah disebabkan oleh 2 faktor utama yaitu :

Tabel 5.33

Alasan terjadinya Anak Putus Sekolah.

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Faktor masalah ekonomi keluarga	12	87,50 %
2	Kurangnya kesadaran orang tua dan motivasi anak	4	12,50%
	Jumlah	16	100 %

Menurut para responden diperoleh gambaran tentang faktor yang utama yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah. Yang cukup dominan karena masalah

ekonomi keluarga yang dikemukakan oleh 12 orang atau 87,50 % informan, lainnya adalah karena faktor kurangnya kesadaran orang tua dan motivasi anak.

9.3. Cara mengatasi putus sekolah

Menurut hasil wawancara dengan responden atau informan pada studi ini, terdapat beberapa cara yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah putus sekolah di sekolah-sekolah yang terdapat di Kabupaten Tangerang. Cara tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.34

Cara mengatasi anak putus sekolah

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sosialisasi/Penyuluhan kesadaran pentingnya pendidikan kepada orang tua	9	56,25 %
2	Sosialisasi/Penyuluhan program wajar 9 tahun	4	25 %
3	Peningkatan wajar jadi 12 tahun (gratis hingga SMA)	2	12,50 %
4	Peningkatan ekonomi masyarakat	1	6,25 %
	Jumlah	16	100 %

Dari tabel di atas diperoleh adanya masukan dari informan atau responden tentang cara untuk mengatasi putus sekolah, yang terbanyak atau 56,25 % responden yang mengusulkan adanya sosialisasi atau penyuluhan kesadaran tentang pentingnya pendidikan kepada orang tua. Usulan lainnya adalah sosialisasi dan penyuluhan program wajar 9 tahun, peningkatan program wajar jadi 12 tahun atau menggratiskan biaya pendidikan hingga SLTA serta peningkatan ekonomi keluarga.

5.19 Pelaksanaan Program Paket A,B dan C

Pendidikan kesetaraan penyelenggaraannya didasarkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 3 yang berbunyi: "Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik".

Pendidikan penyetaraan melalui program Paket A,B,C merupakan salah satu program yang ditujukan dalam rangka mendukung program wajib belajar, sekaligus dapat berpengaruh terhadap peningkatan indeks pendidikan suatu wilayah. Program penyetaraan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada anak putus sekolah dan atau masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki kemampuan dan memiliki ijazah kesetaraan sesuai dengan jenjang pendidikan formal yang ada mulai dari SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/MTS dan SLTA/Madrasah Aliyah.

Melalui mengikuti program Paket A peserta didik dapat mengikuti proses belajar serta memiliki kemampuan dan ijazah yang setara dengan SD; yang mengikuti program Paket B peserta didik dapat mengikuti proses belajar serta memiliki kemampuan dan ijazah setara dengan lulusan SMP; dan yang mengikuti Paket C peserta didik dapat mengikuti proses belajar serta memiliki kemampuan dan ijazah yang setara dengan lulusan SLTA.

10.1. Pelaksanaan Program Kejar Paket A,B dan C

Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas pelaksanaan program Kejar Paket A,B dan C, maka dilakukan wawancara terhadap pelaku pendidikan yang terdapat di Kabupaten Tangerang. Keseluruhan reponden berpendapat bahwa program Kejar Paket A,B dan C belum cukup efektif pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 5.35

Efektifitas pelaksanaan Program Kejar Paket A,B,C

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sudah efektif	-	
2	Belum efektif	16	100 %
	Jumlah	16	100%

10.2. Alasan Efektifitas pelaksanaan Program Kerja Paket A,B dan C

Pendapat dari informan tentang belum efektifnya pelaksanaan program Kejar Paket A,B,C disebabkan karena beberapa hal. Berikut ini hal-hal yang menyebabkan belum efektifnya program Kejar Paket A,B dan C di Kabupaten Tangerang:

Tabel 5.36

Alasan belum efektifitas pelaksanaan Program Kejar Paket A,B dan C

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Belum banyak yang mengetahui	3	18,75%
2	Masalah pembiayaan dan pengurusan ijazah kesetaraan	13	81,25%
	Jumlah	16	100 %

Menurut informan, terdapat minimal 2 faktor yang menjadikan program Kejar Paket A,B dan C belum berhasil, menurut 13 orang atau 81, 25 % responden disebabkan oleh masalah pembiayaan yang memberatkan dan pengurusan ijazah kesetaraan yang sering merasa kesulitan. Faktor lainnya adalah karena belum banyaknya masyarakat yang mengetahui keberadaan program paket A, B dan C.

10.3. Cara meningkatkan pelaksanaan program Paket A, B dan C

Untuk mensukseskan program Paket A,B dan C diperlukan cara dan upaya-upaya melalui kebijakan dan kegiatan-kegiatan sehingga program ini dapat dilakukan secara efektif. Terdapat beberapa usulan dari informan atau responden sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.37

Cara meningkatkan pelaksanaan program Paket A, B dan C

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sosialisasi/Penyuluhan Program Kejar Paket A,B,C	11	68,75%
2	Meringankan biaya dan memberikan kemudahan pengurusan izasah kesetaraan	5	31,25%
	Jumlah	16	100%

5.2.0 Program Dana BOS

Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) merupakan program yang ditujukan untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun. Dengan program ini diharapkan agar anak terbebas dari segala macam bentuk iuran yang dapat memberatkan dan menghambat keberlanjutan sekolahnya. Program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2005, dan diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pendidik dan membantu dalam mengurangi angka putus sekolah dan drop out khususnya dari kalangan anak keluarga miskin atau prasejahtera.

Adapun Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin, yang menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis. Termasuk dari keluarga Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan anak di panti asuhan, Keluarga Harapan (PKH), anak difabel, anak keluarga miskin di pesantren-pesantren dan lainnya. KIP bertujuan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah, sehingga anak-anak tidak lagi ada keinginan untuk berhenti sekolah, karena program KIP ini tidak hanya untuk biaya administrasi, KIP juga membiayai aktivitas anak dalam kegiatan pembelajarannya.

11.a. Efektifitas Pelaksanaan BOS

Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program dana BOS, maka dilakukan wawancara kepada para pelaku pendidikan dan stake holders seperti guru, kepala sekolah, lembaga pelaksana pendidikan, perwakilan masyarakat dan pelaku pendidikan lainnya di Kabupaten Tangerang. Berikut ini penilaian informan atau responden tentang sejauhmana efektifitas program dana BOS di Kabupaten Tangerang.

Tabel 5.38

Efektifitas pelaksanaan program dana BOS

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sudah efektif	1	6,25 %
2	Belum Efektif	15	93,75%
	Jumlah	16	100 %

11.b. Alasan kurang efektifnya program BOS

Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan oleh informan atau responden, dimana dari yang menyatakan sudah efektif yang 1 orang beralasan karena program BOS dan KIP

dapat membantu orang tua yang menginginkan anaknya sekolah. Sementara yang menyatakan belum efektif beralasan; pertama, masih adanya sekolah yang kurang transparan atau terbuka terhadap pengelolan dana BOS, dan alasan kedua masih adanya pemanfaatan yang kurang tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.39

Alasan efektif dan tidaknya pelaksanaan program BIS,KIP dan KIP

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Ada bantuan yang kurang tepat sasaran	3	18,75%
2	Ada sekolah yang kurang transparan/terbuka	12	75 %
3	Membantu orang tua yang menginginkan anaknya sekolah	1	6,25%
	Jumlah	16	100 %

11.c. Cara meningkatkan program BOS dan KIP

Program dana BOS dan KIP merupakan program nasional yang memiliki sasaran untuk mendukung keberhasilan program wajib belajar 9 tahun dengan menghilangkan berbagai hambatan yang disebabkan karena faktor ekonomi keluarga, kemiskinan dan permasalahan keterbatasan keluarga di Indonesia. Untuk itu maka program wajar 9 tahun ini harus berhasil dalam memberikan kesetaraan dan kemampuan dasar bagi warga Indonesia dalam bidang pendidikan.

Sementara itu program BOS dilakukan dalam rangka membantu operasional pendidikan non personal yang diharapkan dapat membantu sekolah-sekolah dalam mengelola pendidikannya. Mengenai belum efektifnya program dana BOS ini di Kabupaten Tangerang, maka para infprman mengusulkan upaya-upaya untuk meningkatkan efektifitas program BOS dan KIP, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.40

Usulan/masukan cara meningkatkan program BOS dan PKH

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Lebih transparan dalam pengelolaan dana BOS dan KIP	4	25%
2	Peningkatan sosialisasi program BOS dan KIP kepada masyarakat	10	62,50%

3	Peningkatan monitoring dan pengawasan pemanfaatan dana Bos dan KIP oleh pihak terkait	1	6,25%
4	Penigkatan Pemerataan pendidikan di kota dan pedesaan	1	6,25%
	Jumlah	16	100 %

Dari tabel di atas diperoleh gambaran tentang usulan atau masukan dari para informan, dimana para informan menyampaikan usulan yang terbanyak yakni 62,50% adalah untuk melakukan peningkatan sosialisasi dan informasi program BOS dan KIP kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami benar pentingnya program tersebut. Selanjutnya terdapat pula responden yang mengajukan usulan untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana BOS dan KIP, dengan transparansi diharapkan dapat mengurangi ketidaktepat sasaran pemanfaatan dana ini. Usulan lainnya adalah peningkatan monitoring dan pengawasan pemanfaatan dana BOS dan KIP oleh pihak terkait serta usulan adanya pemerataan pendidikan di kota dan di pedesaan.

5.2.1 Kendala dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tangerang

Dalam penyeleggaraan dan memajukan pendidikan di Kabupaten Tangerang terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh berbagai pihak khususnya oleh pihak pemangku kepentingan dan pelaksana pendidikan. Berikut ini beberapa kendala dari sudut pandang perwakilan masyarakat dan para pelaku pendidikan di Kabupaten Tangerang :

Tabel 5.41

Kendala dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tangerang

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Bangunan dan Fasilitas pendidikan yang tidak layak dan rusak	13	61,90%
2	Tenaga pendidik yang kurang di pelosok desa	1	4,74 %
3	Bangunan dan fasilitas yang kurang di pelosok desa	1	4,74 %
4	Kesenjangan antara pendidikan di desa	2	9,52 @

	dan kota		
5	Pendidikan yang tidak merata	1	4,74%
6	Tenaga pendidik yang kurang	1	4,74%
7	Masalah ekonomi masyarakat	1	4,74%
8	Tingkat kesadaran orang tua yang kurang	1	4,74%
	Jumlah	21	100 %

Dari tabel di atas, maka diperoleh gambaran adanya beberapa kendala dilihat dari sudut pandang perwakilan masyarakat dan pelaku pendidikan. Sebagian besar responden yakni 13 orang atau 61,90% orang mengemukakan kondisi bangunan dan fasilitas pendidikan yang kurang dan tidak layak menjadi kendala yang menghambat penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya ada kendala lainnya yang dikemukakan responden atau informan yakni tenaga pendidik yang kurang di pelosok desa, sarana dan fasilitas sekolah di daerah pelosok yang kurang, kesenjangan antara pendidikan di desa dan kota. pendidikan yang belum merata, tenaga pendidik yang kurang, masalah ekonomi keluarga dan tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan yang kurang.

5.2.2 Permasalahan Prioritas yang perlu dipecahkan

Di samping adanya kendala dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan, maka terdapat pula permasalahan prioritas yang perlu dipecahkan segera dalam penyelenggaraan dan mensukseskan pendidikan di Kabupaten Tangerang. Ada 3 permasalahan pokok yang menjadi perhatian dan mendapatkan pemecahan segera yakni menyangkut permasalahan kurangnya tenaga pengajar/pendidik, kurangnya sarana dan fasilitas sekolah dan kurang SDM guru di desa/daerah terpencil. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.4.2

Permasalahan prioritas pendidikan yang perlu dipecahkan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Kurangnya Tenaga pengajar/pendidikan	12	35,29 %
2	Kurangnya Sarana dan Fasilitas sekolah	11	32,35 %
3	Kurangnya SDM Guru di Desa terpencil	11	32,35 %
	Jumlah	34	100 %

5.2.3. Kebijakan dan program prioritas untuk peningkatan pendidikan

Kendala dan permasalahan yang ada di seputar penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tangerang memerlukan pemecahan sehingga pendidikan yang diselenggarakan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi dapat dilaksanakan secara efektif. Para perwakilan masyarakat dan pelaku pendidikan mengusulkan adanya kebijakan dan program prioritas untuk peningkatan pendidikan sekaligus memecahkan permasalahan pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Tangerang sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.4.3

Usulan kebijakan dan program prioritas untuk peningkatan pendidikan

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Tenaga pendidik di desa dan kota mendapatkan fasilitas yang sama	5	11,36 %
2	Memberikan perhatian khusus untuk program wajar 12 tahun	3	6,82 %
3	Meningkatkan kualitas pendidikan	12	27.27%
4	Meningkatkan dan menambah tenaga pendidik/pengajar	12	27,27%
5	Membuka dan memberikan kemudahan akses pendidikan	11	25 %
6	Penguatan/peningkatan pelaku pendidikan	1	2,27 %
	Jumlah	44	100%

Mengacu pada pembahasan data hasil wawancara dengan perwakilan guru, kepala sekolah, tokoh masyarakat, penyelenggara pendidikan baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat pemerintahan sebagaimana telah dibahas di atas, maka dapat disarikan kepada hal-hal sebagai berikut :

- Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pendidikan adalah terkait dengan pendaftaran murid baru di sekolah atau madarasah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang umumnya dilakukan dengan cara orang tua/wali murid bersama calon peserta didik mendatangi sekolah dan kemudian mengisi formulir pendaftaran ke sekolah langsung. Hal ini dipandang sudah mudah dan efektif,

meskipun sering menimbulkan antrean. Untuk itu mereka mengusulkan peningkatan cara pendaftaran dengan cara sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara dan persyaratan pendaftaran siswa baru dan pengembangan cara pendaftaran secara online dan membuka bersite sekolah.

- ✚ Tentang pembiayaan sekolah sejalan dengan adanya program wajib belajar (wajib) 9 tahun maka pembiayaan sekolah untuk SD dan SLTP dilakukan secara gratis. Responden secara keseluruhan model pembiayaan ini meringankan orang tua siswa hingga SMP/MTS, sementara untuk tingkat SLTA dan biaya lainnya masih di tanggung oleh orang tua., untuk itu diusulkan program wajib belajar 12 tahu sehingga hingga SMA/MA.
- ✚ Tentang profesionalitas guru, responden umumnya berpendapat bahwa guru-guru yang sudah ada sudah cukup profesional, karena mereka mengajar sesuai dengan keahliannya dan umumnya berpendidikan S1 Dan S2. Masalahnya adalah untuk guru-guru di pesok pedesaan yang disamping perlu penambahan jumlahnya juga diusulkan untuk ditingkatkan profesionalismenya.
- ✚ Untuk aspek sarana dan fasilitas sekolah, para responden banyak menyoroti sarana dan fasilitas sekolah di pelosok desa yang kurang memadai dan sebagian kondisinya rusak. Untuk itu maka penambahan sekolah khususnya sekolah tingkat SLTP dan SLTA hendaknya menjadi prioritas pemerintah daerah.
- ✚ Terkait dengan program wajib belajar 9 tahun sebagai program utama pemerintah dalam meningkatkan indeks pendidikan, menurut sebagian besar responden penyelenggaraannya belum efektif. Ada beberapa faktor penghambatnya diantaranya ; (a) masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, (b) Kurang didukung oleh sarana, fasilitas dan guru yang memadai, khususnya di daerah terpencil. Untuk itu diusulkan peningkatan kualitas dan kuantitas guru terutama di daerah terpencil, sosialisasi program wajib belajar yang lebih intensif kepada masyarakat serta pemerataan sarana, fasilitas dan guru antara diperkotaan dan daerah pedesaan.
- ✚ Tentang pemerataan pendidikan keseluruhan responden menyatakan belum terlaksana efektif. Hal ini (a) Pendidikan (sarana, fasilitas, guru dan lainnya) di daerah terpencil minim/banyak kekurangan, (b) akses menuju dan di daerah pedesaan masih sulit dan kurang. Untuk itu diusulkan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan

pendidikan di daerah terpencil baik sarana, fasilitas dan guru di daerah pelosok desa juga meingkatkan akses transportasi di wilayah pedesaan.

- ✚ Untuk pendidikan bagi kaum miskin, menurut sebagian besar responden sudah dapat dilaksanakan dengan efektif melalui program Wajib Belajar dan BOS. Menurut sebagian besar mereka keluarga miskin sudah mendapat pendidikan dengan baik. Mereka mengusulkan agar untuk meningkatkan pendidikan bagi keluarga miskin/prasejahtera diantaranya pemerataan pendidikan di kota dan pedesaan, sosialisasi wajib belajar 9 tahun, BOS dan dan lainnya agar diketahui masyarakat.
- ✚ Untuk pendidikan bagi masyarakat pedesaan menurut sebagian besar responden anak-anak dari orang tua yang tinggal di pelosok desa belum dapat menyekolahkan anaknya dengan baik, karena keterbatasan sarana dan fasilitas sekolah. Untuk itu diusulkan untuk meningkatkan SDM pelaku pendidikan, memperbanyak sekolah dan merenovasi sekolah di pelosok desa, serta peningkatan ekonomi masyarakat di pelosok desa.
- ✚ Menurut seluruh responden menyatakan bahwa kejadian anak putus sekolah masih terjadi di sekolah-sekolah yang terdapat di Kabupaten Tangerang. Penyebab dominan karena masalah ekonomi keluarga dan karena faktor kurangnya kesadaran orang tua dan motivasi anak. Untuk itu diusulkan adanya penyuluhan kesadaran tentang pentingnya pendidikan kepada orang tua, sosialisasi program wajar 9 tahun, peningkatan program wajar jadi 12 tahun.
- ✚ Salah satu program untuk mendukung peningkatan indeks pendidikan secara langsung adalah Program Paket A,B dan C. Menurut sebagian besar responden pelaksanaannya belum efektif karena belum banyaknya masyarakat yang mengetahui dan masalah pembiayaan yang memberatkan dan pengurusan ijazah kesetaraan yang sering merasa kesulitan. Mereka mengusulkan adanya sosialisasi program Paket A,B, C secara merata dan memberikan kemudahan dalam pengurusan ijazah persamaan.
- ✚ Program lainnya untuk mendukung peningkatan Wajar 9 tahun dan indeks pendidikan adalah program BOS dan Kartu Pintar, yang menurut sebagian besar responden belum efektif. Alasannya belum efektif masih ada sekolah yang kurang transparan atau terbuka terhadap pengelolan dana BOS serta ada bantuan yang kurang tepat sasaran. Agar lebih efektif, maka perlu peningkatan sosialisasi program BOS dan KIP, peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana BOS dan KIP, serta peningkatan monitoring dan pengawasan pemanfaatn dana BOS dan KIP.

- ✚ Dalam penyelegaraan dan memajukan pendidikan di Kabupaten Tangerang terdapat beberapa kendala. Kendala itu adalah kondisi bangunan dan fasilitas pendidikan yang kurang, kuranya tenaga pendidik, sarana dan fasilitas sekolah di daerah pelosok, kesenjangan antara pendidikan di desa dan kota, pendidikan yang belum merata, tenaga pendidik yang kurang, masalah ekonomi keluarga dan tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan yang kurang.

5.2. ANALISIS PEMECAHAN PERMASALAHAN (PROBLEM SOLVING)

Untuk menganalisis permasalahan dan faktor penyebab rendahnya peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Tangerang digunakan analisis problem solving. Problem solving adalah suatu proses menemukan masalah dan memecahkan permasalahan berdasarkan dan informasi yang akurat sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan akurat. Dalam analisis problem solving ini dilakukan dengan 3 tahap yaitu : pertama, tahap memahami permasalahan (*understanding the problem*); kedua, menemukan akar masalah.faktor penyebab (*find the root cause*) dan ketiga merumuskan cara memperbaiki atau mengatasi masalah (*remove the root cause*).

Secara umum dapat dikatakan bahwa rendahnya indeks pendidikan di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Tangerang terkait dengan berbagai hal dan tidak disebabkan oleh hanya satu sebab, akan tetapi disebabkan oleh berbagai sebab dan faktor yang terkait baik sosial, ekonomi dan aspek-aspek dalam pendidikan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa persoalan indeks pendidikan juga terkait dengan aspek ekonomi keluarga, pemerataan pendidikan, mutu atau kualitas pendidikan, relevansi output sekolah dengan dunia pekerjaan, atau juga masih belum efektifnya kebijakan dan program-program pendidikan yang dilaksanakan di suatu daerah.

Mengacu hasil dari kajian data baik sekunder ataupun data hasil wawancara mendalam, maka dapat disimpulkan terdapatnya beberapa permasalahan terkait dengan rendahnya peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Tangerang. Permasalahan tersebut menyangkut Pertama, permasalahan internal orang tua dan anak sekolah. Dalam hal ini terdapat masalah : Terdapatnya anak yang putus sekolah dan sebagian besar anak hanya mengikuti pendidikan sampai SMP/MTS ataupun SMA/Madarasan Aliyah.

Kedua, permasalahan pemerataan pendidikan bagi semua masyarakat. Terkait dengan pemerataan pendidikan : Kurangnya kuantitas dan kualitas guru di pedesaan, Kurangnya sarana fasilitas sekolah di pelosok desa, kurangnya mutu pendidikan di ekolah swasta, serta jurangnya manajemen sekolah swasta.

Ketiga permasalahan yang terkait dengan efektifitas penyelenggaraan progam pemerintah di bidang pendidikan yakni Program BOS dan KIP yang belum efektif serta Program Kerjar Paket A,B,C belum efektif.

Berikut ini analisis prolem solving yakni analisis permasalahan, faktor penyebab dan alternatif pemecahan masalah terhadap rendahnya peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Tangerang.

Tabel 5.44
Analisis Pemecahan Permasalahan (*problem solving*) Rendahnya Peningkatan Indeks Pendidikan
di Kab. Tangerang

No	Aspek	Permasalahan Pokok	Faktor Penyebab	Alternatif Pemecahan Masalah
1	Internal orang Tua dan Anak	Masih banyaknya anak yang putus sekolah	<ul style="list-style-type: none"> ➡ Kurangnya kemampuan ekonomi orang tua untuk membiayai sekolah, ➡ Kurangnya kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anaknya, ➡ Kurangnya motivasi anak untuk sekolah ➡ Kurangnya upaya pencegahan anak untuk tidak putus sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ Memberi prioritas bagi anak dari keluarga miskin rentan putus sekolah untuk ditanggung seluruh biaya sekolahnya ➡ Peningkatan penyuluhan pentingnya pendidikan bagi keluarga pra sejahtera ➡ BP sekolah rutin memberikan motivasi khusus kepada anak yang rentan putus sekolah ➡ Pemantauan dan pendekatan dari sekolah terhadap anak yang rentan putus sekolah ➡ Memfasilitasi anak yang terlanjur putus sekolah untuk mengikuti Program Kejar Paket
		Anak umumnya menamatkan sekolah sampai jenjang pendidikan SMP/MTS dan	<ul style="list-style-type: none"> ➡ Kemampuan ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai anak hingga kuliah di perguruan tinggi, ➡ Kurangnya motivasi orang tua dan anak untuk melanjutkan pendidikan anaknya 	<ul style="list-style-type: none"> ➡ Peningkatan Program Wajar hingga 12 tahun atau pendidikan gratis hingga SMA/MA ➡ Guru dan aparat pemerintahan dari tingkat daerah hingga Desa dan RT RW selalu memotivasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya

		SMA/MA	<p>hingga perguruan tinggi,</p> <p>➡ Kebutuhan keluarga dan keinginan anak untuk cepat mencari kerja.</p>	setinggi-tingginya
2	Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah	Kurangnya kuantitas dan kualitas guru di pedesaan	<p>➡ Terbatasnya SDM guru khususnya di pedesaan</p> <p>➡ Keengganaan sebagian guru bertugas di pelosok desa</p> <p>➡ Kurangnya pembinaan, asistensi dan diklat untuk guru di pedesaan</p>	<p>➡ Penambahan guru-guru untuk bertugas di pelosok desa</p> <p>➡ Memberikan insentif khusus bagi guru-guru yang bertugas di pelosok desa</p> <p>➡ Peningkatan pembinaan, asistensi dan pendidikan/latihan kepada guru-guru di pelosok desa</p>
		Kurangnya sarana fasilitas sekolah di pelosok desa	<p>➡ Perhatian Pemda untuk pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan di desa belum maksimal</p> <p>➡ Kurangnya pemantauan kondisi dan kebutuhan sekolah di pelosok desa</p>	<p>➡ Penambahan sekolah, khususnya untuk jenjang SMP/MTS dan SLTA di pelosok-pelosok desa</p> <p>➡ Pemantauan secara intensif dan perbaikan sekolah di daerah pelosok desa secara cepat</p>
		Kurangnya mutu pendidikan di sekolah swasta	Keterbatasan sarana, fasilitas dan kualitas guru di sekolah swasta	<p>➡ Pendampingan dari Dinas Pendidikan untuk pengembangan mutu pendidikan di sekolah-sekolah swasta</p> <p>➡ Kerjasama sekolah swasta dengan sekolah negeri dalam pengembangan mutu pendidikan</p>
		Kurangnya	➡ Kurangnya sistem jenjang	➡ Pemda memberikan asistensi peningkatan

		manajemen sebagian sekolah swasta	manajemen/karir di sekolah swasta <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya diklat untuk manajemen sekolah swasta 	manajemen sekolah swasta <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Sekolah, Wakil Kepsek, dan unit-unit pengelola kegiatan di sekolah swasta
3	Penyelenggaraan program wajar 9 tahun dan penyetaraan	Program dana BOS belum efektif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebagian masyarakat belum memahami tujuan dan pentingnya program BOS ➤ Masih adanya sekolah yang kurang transparan ➤ Adanya pemberian bantuan yang kurang tepat sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan sosialisasi program dana BOS kepada masyarakat ➤ Peningkatan pengawasan pengelolaan dana BOS ➤ Peningkatan mekanisme penyaluran dana BOS
		Program Penyetaraan/Kejar Paket A,B,C belum efektif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebagian masyarakat belum mengetahui program dan tata cara program Kejar Paket ➤ Kurangnya manajemen pengelolaan program oleh PKBM ➤ Permasalahan pembiayaan dan pengurusan ijazah penyetaraan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan sosialisasi Kejar Paket kepada masyarakat dan stake holders, khususnya kepada anak putus sekolah dan orang tua yang tuna aksara ➤ Pelatihan manajemen pengelolaan bagi PKBM-PKBM yang ada. ➤ Memberikan kemudahan dan menghilangkan pembiayaan pengurusan ijazah penyetaraan
		Program Indonesia Pintar (PIP) belum efektif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebagian masyarakat belum mengetahui program dan tatacara pelaksanaannya ➤ Kurangnya peranserta pelaku 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi program secara intensif dan merata tetang program dan cara pelkasanaanya kepada masyarakat ➤ Peningkatan peranserta sekolah, kelembagaan

			pendidikan dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program KIP	pendidikan nonformal (pesantren, lembaga kursus, PKBM, yayasan dan lainnya (serta masyarakat umumnya dalam pelaksanaan program
--	--	--	--	--

5.3. ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

Dalam upaya mempertajam temuan kajian maka dilakukan analisis faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Tangerang. Analisis faktor internal mencakup analisis kekuatan (*strengthness*) dan kelemahan (*weakness*). Adapun faktor analisis eksternal mencakup analisis peluang (*opportunities*) dan ancaman (*thread*).

Proses analisis diawali dengan identifikasi kekuatan (*strength*) yang dimiliki dan ada di Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan indeks pendidikan, selanjutnya identifikasi kelemahan yakni kekurangan yang dapat menghambat tercapainya peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Tangerang. Setelah identifikasi faktor internal, selanjutnya identifikasi faktor eksternal yakni mengidentifikasi peluang-peluang untuk peningkatan indeks pendidikan, kemudian mengidentifikasi ancaman-ancaman dari luar yang apabila dibiarkan berpotensi menyebabkan kegagalan peningkatan indeks pendidikan.

Proses selanjutnya merumuskan strategi dengan mengembangkan strategi peningkatan indeks pendidikan dengan mengembangkan kekuatan dan peluang yang ada (strategi S+O) dan mengembangkan strategi W+O yakni strategi bagaimana mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian mengembangkan strategi S + T yang strategi mengembangkan kekuatan untuk menghadapi ancaman, serta strategi W+T yakni strategi bagaimana mengatasi kelemahan dan ancaman, sehingga tidak menghambat peningkatan indeks pendidikan.

Berikut ini analisis faktor internal dan faktor eksternal peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Tangerang :

Tabel : 5.45. Analisis Faktor Internal dan Eksternal untuk Peningkatan Indeks Pendidikan di Kabupaten Tangerang

	STRENGTHNESS	WEAKNESS
<p>ANALISIS FAKTOR INTERNAL</p> <p>ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ APBD Prov. Banten dan Kab. Tangerang untuk pendidikan yang besar ◆ Program wajar 9 tahun dan Kejar Paket A,B dan C sudah berjalan lama ◆ Program KIP dan PKH untuk keluarga miskin dan kurang derdaya ◆ Terdapat 860 SD, 140 SMP, 24 SMA dan 77 SMK ◆ Terdapat 173 MI, 197 MTS dan 88 Madrasah Aliyah ◆ Terdapat 23 PKBM di Kab. Pendeglang dan lembaga pendidikan non pormal lainnya ◆ Memiliki pondok pesantren terbanyak di Prov. Banten ◆ Banyaknya Yayasan dan Kelembagaan Pendidikan Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Masih banyaknya anak yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP tahun 2016 sebanyak 459 dan tahun 2017 sebanyak 204 anak, karena faktor ekonomi dan kurangnya motivasi anak dan orang tua ◆ Anak umumnya menamatkan sekolah sampai jenjang pendidikan SMP/MTS dan SMA/MA ◆ Kurangnya kuantitas dan kualitas guru di pedesaan ◆ Kurangnya sarana dan fasilitas sekolah, khususnya sekolah menengah di pelosok desa ◆ Program BOS dan KIP belum efektif dan belum tersosiliasasi dengan merata ◆ Program Kejar Paket A,B,C belum efektif serta belum terkelola dan tersosialisasi dengan merata ◆ Pesantren salafiyah umumnya tidak menyelenggarakan pendidikan formal untuk santrinya ◆ Terbatasnya perguruan tinggi di Kabupaten Tangerang

OPPORTUNITY	STRATEGI S+O	STRATEGI W+O
<ul style="list-style-type: none"> ◆ APBN ◆ Program Kemendiknas ◆ Program Kemenag dan kementerian terkait ◆ Organisasi guru/PGRI ◆ Dunia Usaha di Prov Banten ◆ Ormas Pendidikan seperti Muhamadiyah, NU, Manth. Anwar dan yayasan pendidikan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Peningkatan Kerjasama dan koordinasi yang intensif antara Pemda, Kemendikbud, Kemenag dan pihak pemangku kepentingan lainnya untuk mensukseskan program wajar, penyetaraan dan lainnya di Kab. Tangerang ⊕ Peningkatan sarana dan fasilitas sekolah mulai SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA sesuai kebutuhan ⊕ Mengembangkan kemitraan Pemda dengan ormas pendidikan, organisasi guru dan yayasan pendidikan untuk menjadikan program wajar, Kejar paket dan KIP dan lainnya sebagai sebuah gerakan pendidikan yang terorganisir ⊕ Pendampingan dan pelatihan peningkatan manajemen pendidikan/sekolah bagi pengurus dan pengelola yayasan pendidikan/sekolah swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Pemantauan dan peningkatan motivasi anak rentan putus sekolah, dan peningkatan Kerjasama sekolah dengan PKBM dan kelembagaan masyarakat untuk mengantisipasi anak putus sekolah ⊕ Perintisan program wajar 12 tahun serta peningkatan motivasi orang tua dan anak untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi ⊕ Peningkatan pemerataan pendidikan dengan peningkatan sarana dan fasilitas pendidikan khususnya sekolah menengah serta peningkatan kualitas dan kuantitas guru di pelosok desa ⊕ Mendorong Pd Pesantren salafi bekerjasama dengan sekolah, PKBM Kejar Paket dan KIP untuk memberikan pendidikan formal pada santrinya ⊕ Mendorong dan memberikan kemudahan kepada dunia usaha, organisasi guru, ormas pendidikan seperti NU, Muhamadiyah, M. Anwar dan lainnya untuk mendirikan Peguruan Tinggi di Tangerang ⊕ Peningkatan manajemen pengelolaan program dan sosialisasi yang lebih intensif tentang dana BOS, program Wajar, Kejar Paket, KIP dan PKH

THREAD	STRATEGI S+T	STRATEGI W+T
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Narkoba ◆ Kenakalan dan tawuran antar sekolah ◆ Dampak internet 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pemantauan secara intensif untuk pencegahan narkoba, kenakalan remaja dan tawuran antar sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memperkuat organisasi siswa (OSIS), Rohis dan kegiatan ekstra kurikuler sekolah lainnya dalam pencegahan terhadap narkoba, kenakalan remaja dan dampak negatif internet/digital

5.4. STRATEGI DAN PROGRAM KERJA PENINGKATAN INDEKS PENDIDIKAN

Untuk meningkatkan indeks pendidikan di Kabupaten Tangerang, maka diperlukan strategi yang disusun dengan mengacu pada pengembangan kekuatan dan potensi pendidikan yang terdapat di Kabupaten Tangerang, memanfaatkan sebesar-besar-besarnya peluang yang dimiliki serta menutupi kekurangan dan kelemahan serta menolak ancaman dari luar yang dapat menggalkan tujuan pendidikan dan upaya-upaya untuk peningkatan indeks pendidikan.

Strategi dan program peningkatan indeks pendidikan ini disusun berorientasi pada sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya mutu pendidikan dengan pemerataan guru dan pengembangan sarana dan fasilitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi
- 2) Percepatan pencapaian pemerataan pendidikan dan pencapaian program wajar 9 tahun menuju wajar 12 tahun
- 3) Berkurangnya kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan serta antara pendidikan di sekolah swasta dan negeri baik dalam mutu pendidikan maupun sarana, fasilitas dan ketersediaan pendidik.
- 4) Optimalisasi program dana BOS, Program Penyetaraan Paket A,B,C dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencegah dan menanggulangi anak putus sekolah dan mendukung peningkatan indeks pendidikan
- 5) Berkembangnya peran serta masyarakat, organisasi masyarakat dan kelembagaan/organisasi masyarakat dalam peningkatan pelaksanaan pendidikan formal dan pelaksanaan program wajar dan penyetaraan guna peningkatan indeks pendidikan

Berikut ini strategi prioritas, program berikut indikasi kegiatan untuk peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Tangerang :

Tabel 5.46 : Setrategi dan Program Akselerasi Peningkatan Indeks Pendidikan di Kabupaten Tangerang

No	Program	Setrategi	Indikasi Kegiatan
1	Pencegahan dan penanggulangan anak putus sekolah	Pemantauan dan peningkatan motivasi orang tua dan anak rentan putus sekolah, serta peningkatan kerjasama sekolah dengan PKBM dan kelembagaan masyarakat untuk mengantisipasi anak putus sekolah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantauan dan deteksi dini anak rentan putus sekolah di sekolah-sekolah ➤ Penyuluhan pentingnya pendidikan bagi keluarga dari anak yang rentan putus sekolah ➤ BP sekolah rutin memberikan motivasi khusus kepada anak yang rentan putus sekolah ➤ Memfasilitasi anak yang terlanjur putus sekolah untuk mengikuti Program Kejar Paket ➤ Memberi prioritas bagi anak dari keluarga miskin rentan putus sekolah untuk ditanggung seluruh biaya sekolahnya melalui PIP
2	Peningkatan kelulusan pendidikan Anak minimal SMA/MA	Perintisan program wajar 12 tahun serta peningkatan motivasi orang tua dan anak untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rintisan Program Wajar hingga 12 tahun atau pendidikan gratis hingga SMA/MA ➤ Pendataan kelulusan dan kelanjutan sekolah anak di sekolah SD/MI dan SMP/MTS ➤ Optimalisasi peran BP Sekolah untuk memotivasi anak melanjutkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi
3	Peningkatan Pemerataan pendidikan antara kota dan pedesaan	Peningkatan kualitas dan kuantitas guru serta sarana dan fasilitas pendidikan dengan prioritas di pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penambahan guru-guru yang bertugas di pelosok desa ➤ Memberikan insentif khusus bagi guru-guru yang bertugas di pelosok desa ➤ Penambahan sekolah di pelosok desa, khususnya untuk jenjang SMP/MTS dan SMA/MA/SMK ➤ Pemantauan kondisi sekolah dan fasilitas pendidikan serta identifikasi kebutuhan perbaikan dan penambahan sarana dan fasilitas pendidikan

4	Peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah	Peningkatan kualitas pendidikan, tenaga pengajar serta sarana dan fasilitas pendidikan dasar dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadaan sarpras pendidikan dasar dan menengah. ➤ Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan dasar dan menengah. ➤ Rintisan program wajar 12 tahun ➤ Peningkatan kuantitas dan kompetensi peserta didik pada sekolah kejuruan. ➤ Penambahan dan rehab ruang belajar sekolah sesuai kebutuhan ➤ Perbaikan fasilitas KBM, perpustakaan, laboratorium dan fasilitas kegiatan ekstra kurikuler
5	Penyetaraan mutu pendidikan swasta dengan sekolah negeri	Pendampingan dan pelatihan peningkatan manajemen pendidikan/sekolah bagi pengurus dan pengelola yayasan pendidikan/sekolah swasta	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendampingan (asistensi) pengembangan mutu pendidikan dan manajemen sekolah-sekolah swasta ➤ Pendidikan dan pelatihan pengembangan mutu pendidikan dan manajemen bagi Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Swasta ➤ Kerjasama sekolah swasta dengan sekolah negeri dalam pengembangan mutu pendidikan
6	Peningkatan efektifitas pengelolaan dana BOS	Peningkatan pengelolaan dana BOS yang lebih transparan dan tepat sasaran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan sosialisasi program dana BOS kepada masyarakat ➤ Peningkatan mekanisme penyaluran dana BOS yang transparan dan tepat sasaran ➤ Peningkatan pengawasan pengelolaan dana BOS
7	Peningkatan efektifitas Program Kejar Paket A,B,C	Peningkatan profesionalisme manajemen PKBM dan peningkatan peranserta masyarakat, organisasi dan kelembagaan sosial	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi Kejar Paket kepada masyarakat dan stake holders, khususnya kepada anak putus sekolah dan orang tua ➤ Peran serta Pesantren Salafiyah yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal untuk penyelenggaraan program Kejar Paket untuk santrinya

		dalam pengembangan program Kejar Paket A,B,dan C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kampanye kepada anak dan remaja (usia 7 s.d. 24 tahun) yang putus sekolah/tidak menamatkan sekolah hingga lulus SLTA untuk mengikuti Kejar Paket A ➤ Pelatihan manajemen pengelolaan bagi PKBM-PKBM yang ada. ➤ Memberikan kemudahan dan menghilangkan pembiayaan pengurusan ijazah penyetaraan
8	Peningkatan efektifitas Program Indonesia Pintar (PIP)	Peningkatan peranserta sekolah, kelembagaan pendidikan nonformal (pesantren, lembaga kursus, PKBM, yayasan dan lainnya serta masyarakat umumnya dalam pelaksanaan program	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi program secara intensif dan merata tentang program dan cara pelaksanaannya kepada masyarakat ➤ Meningkatkan kemitraan PIP dengan sekolah, pesantren, lembaga kursus, PKBM, yayasan dan lainnya dalam seleksi dan pemantauan pelaksanaan PIP
9	Memperbanyak perguruan tinggi di Kabupaten Tangerang	Mendorong dan memberikan kemudahan kepada dunia usaha, organisasi guru, ormas pendidikan seperti NU,Muhamadiyah, M. Anwar dan lainnya untuk mendirikan Perguruan Tinggi di Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendirian perguruan-perguruan tinggi umum bagi lulusan sekolah umum ➤ Pendirian perguruan-perguruan tinggi agama bagi lulusan sekolah agama ➤ Memfasilitasi Perizinan pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Tangerang

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN

Penelitian Indeks Pendidikan di Kabupaten Tangerang telah dilaksanakan dan dilakukan melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, perumusan hasil studi dan pelaporan. Berdasarkan hasil kajian, randahnya peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari beberapa faktor diantaranya: masih banyaknya anak putus sekolah; masih kurangnya kesadaran sebagian orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan anaknya; belum meratanya sarana, fasilitas dan tenaga pendidikan dalam pendidikan dasar dan menengah; kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan di wilayah pelosok desa; belum efektifnya pelaksanaan program wajar 9 tahun dan program lainnya seperti program penyetaraan paket A, B dan C, program Indonesia Pintar (PIP), program dana BOS dan lainnya; belum maksimalnya pengembangan partisipasi masyarakat dan kelembagaan/organisasi masyarakat dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan, dan faktor lainnya.

Indeks Pendidikan di Kabupaten Tangerang memiliki potensi untuk meningkat secara signifikan. Untuk itu, perlu program akselerasi peningkatan indeks pendidikan dengan berpijak pada upaya pengembangan semaksimal mungkin kekuatan dan potensi pendidikan yang dimiliki oleh wilayah dan masyarakat Kabupaten Tangerang diantaranya : APBD bidang pendidikan yang besar; keberadaan lembaga pendidikan dasar dan menengah yang cukup banyak; potensi banyaknya kelembagaan masyarakat, yayasan, PKBM, lembaga kursus, khususnya pondok pesantren dengan jumlah terbanyak di Provinsi Banten, serta potensi lainnya untuk peningkatan pendidikan di Kabupaten Tangerang.

6.2. REKOMENDASI

Mengacu pada hasil analisis data pada Kajian Peningkatan Indeks Pendidikan di Kabupaten Tangerang, maka direkomendasikan :

- 1) Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang direkomendasikan untuk melaksanakan program akselerasi peningkatan indeks pendidikan diantaranya : Pencegahan dan penanggulangan anak putus sekolah, peningkatan kelulusan pendidikan anak minimal SMA/MA; peningkatan pemerataan pendidikan antara kota dan pedesaan; peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah; penyetaraan mutu pendidikan swasta dengan sekolah negeri; peningkatan efektifitas pengelolaan dana BOS, Kejar Paket, Program Indonesia Pintar (PIP); memperbanyak perguruan tinggi di Kabupaten Tangerang; serta peningkatan peran serta masyarakat, kelembagaan/organisasi masyarakat, pondok pesantren dan simpul-simpul komunitas lainnya di Kabupaten Tangerang dalam pendidikan.
- 2) Untuk masyarakat, kelembagaan/organisasi masyarakat, lembaga dan yayasan pendidikan, pondok pesantren dan kelompok masyarakat yang terdapat di Kabupaten Tangerang direkomendasikan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan; mensosialisasikan dan berperan serta dalam program-program wajar, kejar paket, PIP dan lainnya sesuai aturan dan kapasitasnya; meningkatkan kesadaran dan motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
- 3) Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya untuk dapat mendukung program akselerasi peningkatan indeks pendidikan di Kabupaten Tangerang dengan melakukan penyesuaian program-programnya sesuai dengan kebutuhan dan program yang dicanangkan oleh Pemda Kabupaten Tangerang.

Daftar pustaka

Buku profile kab. Tangerang tahun 2017

Simanjuntak, Payaman. J. 2008. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga Penelitian FE UI. Jakarta. Hal.25

Maulana, R. & Bowo, P. A. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Teknologi terhadap IPM Provinsi di Indonesia 2007-2011. *Journal of Economics and Policy*. 6 (2), 163-169.

UNDP, Human Development Report, 2008

Charisma Kuriata Ginting S, dkk (2008) melakukan penelitian yang berjudul “Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, *Economics Development Analysis Journal*. Vol 1 November 2012

Astri Winarti, Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012. Skripsi; Repasitory Perpustakaan Universitas Diponegoro